



Keberadaan Paguyuban-Paguyuban Etnis Di Daerah Perantauan Dalam Menunjang Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan

(Kasus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Di Pontianak)

Direktorat
Kebudayaan
47

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJAHAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI
JAKARTA 1999 - 2000

305.809847
SRI
h

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

KEBERADAAN PAGUYUBAN ETNIS DI DAERAH PERANTAUAN DALAM MENUNJANG PERSATUAN DAN KESATUAN

(Kasus Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Di Pontianak)

MILIK KEPUSTAKAAN
DIREKTORAT TRADISI
DITJEN NBSF DEPDUPAR

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BAGIAN PROYEK PENGAJIAN DAN PEMBINAAN
KEBUDAYAAN MASA KINI
JAKARTA 1999 / 2000**

**KEBERADAAN PAGUYUBAN ETNIS DI DAERAH PERANTAUAN
DALAM MENUNJANG PERSATUAN DAN KESATUAN (Kasus
Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Di Pontianak)**

Tim Penulis : Sri Guritno
Damardjati Kunmarjanto
Penyunting : Djoko Mudji Rahardjo
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Diterbitkan oleh : Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan
Masa Kini Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan

Jakarta 1999

Edisi 1999

Dicetak oleh : **CV. BIMA SAKTI RAYA**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Pembinaan nilai-nilai budaya Indonesia ditekankan pada usaha menginventarisasi dan memasyarakatkan nilai-nilai budaya Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, program pembinaan kebudayaan diarahkan pada pengembangan nilai-nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa sehingga dapat memperkuat kepribadian bangsa mempertebal rasa harga diri, memunculkan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan.

Penerbitan buku sebagai upaya untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat patut dihargai. Pengenalan aspek-aspek kebudayaan masa kini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan dalam menghadapi perkembangan jaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kami dengan gembira menyambut terbitnya buku hasil kegiatan **Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini** Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesalingkenalan, dengan harapan akan tercapai tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Berkat kerjasama yang baik antara tim penulis dengan para pengurus proyek buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan hasil suatu penelitian sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan. Di harapkan hal tersebut dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbang pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, Juli 1999

Direktur Jenderal Kebudayaan



I.G.N. Anom
NIP. 130353848

PRAKATA

Pada era globalisasi ini, kemajuan teknologi telah menyebabkan interaksi diantara bangsa-bangsa di dunia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kejadian di belahan dunia yang satu segera dapat dirasakan dan dinikmati oleh belahan dunia yang lain. Begitu intensifnya komunikasi antarbangsa dewasa ini telah menyebabkan akulturasi kebudayaan dengan cepat merambah hampir disetiap sektor kehidupan.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini berupaya untuk merekam berbagai perubahan kebudayaan. Dengan mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi diharapkan dapat dipersiapkan tatanan masyarakat yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Penerbitan buku hasil perekaman ini merupakan suatu upaya untuk menyebarluaskan informasi kebudayaan mengenai berbagai gejala sosial, serta perkembangan kebudayaan, seiring kemajuan dan peningkatan pembangunan. Upaya ini dirasa perlu sebab segala tindakan pembangunan tentu akan memunculkan tanggapan bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu memahami gejala sosial akibat dari pembangunan perlu dilakukan agar dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

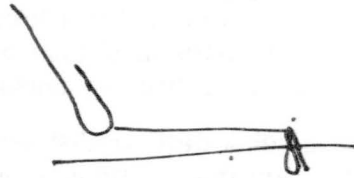
Kepada tim penulisan dan semua pihak baik lembaga pemerintah maupun swasta yangtelah membantu sehingga terwujudnya karya ini disampaikan terima kasih.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini belum memadai, diharapkan kekurangan-kekurangan itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca serta memberikan petunjuk bagi kaji selanjutnya.

Jakarta, Juli 1999

**Bagian Proyek Pengkajian dan
Pembinaan Kebudayaan Masa Kini**

Pemimpin,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'W' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

Wisnu Subagijo, BA
NIP. 130517125

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN SIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar	1
B. Permasalahan	3
C. Kerangka Pemikiran	4
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Pengumpulan Data	7
F. Kerangka Laporan	8
BAB II. KKSS DI KOTAMADYA PONTIANAK	
A. Kotamadya Pontianak	11
1. Letak Astronomi, Geografi dan Pembagian Wilayah Administratif	11
2. Fungsi Kota	14
3. Kependudukan	14
4. Berbagai Paguyuban di kota Pontianak	20
B. Sejarah Singkat Paguyuban KKSS	22
C. Organisasi Paguyuban KKSS	23
D. Kegiatan-Kegiatan Paguyuban KKSS	26

BAB III. PERANAN PAGUYUBAN TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTANYA	
A. Kehidupan Sosial	32
B. Kehidupan Ekonomi	38
C. Kehidupan Budaya	41
D. Kehidupan Politik	44
BAB IV. PERANAN PAGUYUBAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR	
A. Hubungan KKSS dengan Paguyuban Lainnya	49
B. Hubungan Paguyuban dengan Masyarakat Lokal	53
C. Hubungan Paguyuban dengan Pemda Setempat	56
D. Hubungan Paguyuban dengan Pemerintah Daerah Asal	58
BAB V. ANALISIS	
A. Kekuatan Sentripetal	65
B. Kekuatan Sentrifugal	70
BAB VI. SIMPULAN	75
KEPUSTAKAAN	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
DAFTAR INFORMAN	94

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL

1. Hujan perhari, suhu dan curah hujan	12
2. Luas Wilayah menurut jenis penggunaan	13
3. Jumlah penduduk menurut kelompok umur	15
4. Jumlah penduduk yang datang dan pindah	16
5. Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan	17
6. Jumlah penduduk menurut agama	18
7. Peserta KB dan alan kontrasepsi yang digunakan	19
8. Jumlah penduduk menurut pendidikan	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar

Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak hanya terbatas pada banyaknya suku bangsa dengan latar kebudayaan, sejarah, dan agama yang beraneka ragam. Akan tetapi, juga karena adanya penggolongan sosial yang terwujud karena perbedaan lingkungan geografis, lingkungan sosial maupun etnis. Di samping itu, kemajemukan tersebut juga diwarnai oleh adanya dikotomi yang membedakan penduduk kota sebagai pusat administratif, politik, dan perdagangan dengan penduduk pedesaan yang berada di perbatasan dan menjadi bagian “pelengkap” masyarakat di daerah perkotaan.

Kemajemukan masyarakat di daerah perkotaan sebenarnya lebih banyak diakibatkan oleh adanya faktor-faktor migrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang secara khusus sering dikenal dengan istilah urbanisasi. Sebagai akibat dari urbanisasi ini, maka penduduk di daerah perkotaan menjadi semakin padat dan heterogen. Mereka hidup di tengah-tengah perbedaan-perbedaan besar dalam tata kelakuan, sikap, status sosial, jenis pekerjaan, dan sebagainya.

Dengan semakin padat dan heterogennya penduduk di daerah perkotaan telah menyebabkan hubungan antarmanusia

cenderung bersifat impersonal, yaitu hubungan tidak langsung yang hanya didasarkan atas kepentingan-kepentingan yang sama. Dengan kata lain bahwa hubungan manusia sudah merupakan hubungan sekunder dan tidak lagi didasarkan atas hubungan yang intim. Hal ini karena aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak memungkinkan lagi untuk berkumpul setiap saat. Kalau pun terdapat hubungan yang agak erat biasanya karena mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan saling menguntungkan satu sama lain.

Di samping itu, perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat di daerah perkotaan juga akan mengakibatkan semakin besarnya perbedaan-perbedaan mereka dalam hal kepentingan, sehingga akan mengakibatkan berkurangnya rasa solidaritas di antara mereka. Untuk menciptakan rasa solidaritas tersebut, maka penduduk di daerah perkotaan telah membentuk perkumpulan-perkumpulan yang dapat menampung aspirasi dan kepentingan mereka. Satu di antara perkumpulan-perkumpulan itu adalah perkumpulan etnis atau kedaerahan yang didirikan oleh kaum imigran di daerah perantauan atau di perkotaan. Perkumpulan etnis atau kedaerahan ini seringkali disebut dengan istilah paguyuban. Oleh karena banyaknya kaum imigran dari berbagai daerah yang mendirikan perkumpulan atau paguyuban etnis atau kedaerahan, maka perkumpulan atau paguyuban tersebut banyak bermunculan di daerah perkotaan. Gejala ini seakan-akan telah membuat masyarakat di daerah perkotaan menjadi terkotak-kotak ke dalam berbagai subkultur. Sungguhpun demikian, di arena umum lokal biasanya mereka mengacu pada budaya umum lokal sebagai kerangka acuan dalam berinteraksi.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka tulisan ini hendak mengkaji keberadaan perkumpulan atau paguyuban etnis atau kedaerahan di daerah perkotaan dengan tema Keberadaan Paguyuban-Paguyuban Etnis atau Kedaerahan di Daerah Perantauan dalam Pembinaan Persatuan dan Kesatuan.

B. Permasalahan

Keberadaan perkumpulan atau paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan yang didirikan oleh kaum imigran di daerah perantauan atau di perkotaan cenderung menciptakan sub-kultur tersendiri. Hal ini karena perkumpulan atau paguyuban-paguyuban tersebut telah memperlihatkan adanya nuansa keetnisan atau kedaerahan dimana kaum imigran itu berasal, selain merupakan upaya mereka untuk mendapatkan rasa aman. Di samping itu, kontak-kontak yang terjadi antarsesama penduduk di daerah perkotaan dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda tampaknya juga telah mendorong mereka untuk mendirikan perkumpulan atau paguyuban-paguyuban tersebut. Dengan demikian di tengah-tengah masyarakat perkotaan yang majemuk itu, mereka tetap dapat memperlihatkan jati dirinya.

Dengan adanya perkumpulan atau paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan tersebut di atas, di satu pihak kaum imigran di daerah perkotaan pada dasarnya merasa mempunyai ikatan moral dengan daerah asalnya. Di lain pihak, gejala ini tampaknya telah menimbulkan masyarakat di daerah perkotaan seolah-olah menjadi terpecah-pecah. Penduduk di daerah perkotaan bukan lagi menjadi satu kesatuan yang besar, padat dan terpadu, akan tetapi terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Sementara itu hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam perkumpulan atau paguyuban-paguyuban tersebut pada umumnya hanya terbatas pada hubungan antarsesama anggotanya atas dasar kepentingan-kepentingan bersama.

Sungguhpun demikian, manakala pembagian pekerjaan di daerah perkotaan semakin meningkat dan kehidupan sosial makin saling tergantung sifatnya, maka hubungan-hubungan sosial tersebut juga akan meningkat tidak hanya terbatas pada hubungan antar sesama anggota perkumpulan, akan tetapi juga di luar anggota perkumpulannya. Meningkatnya hubungan-hubungan sosial ini pada gilirannya akan merangsang terjadinya perubahan dalam tiap-tiap kebudayaan

yang berinteraksi dan turut memainkan peranan. Sehingga daerah perkotaan yang ditandai oleh heterogenitas, keragaman etnis dan unsur-unsur budaya benar-benar menjadi “tempat bercampur” (melting pot).

Berdasarkan uraian di atas maka keberadaan perkumpulan atau paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan di daerah perantauan atau di perkotaan sebenarnya mempunyai dua kepentingan, yaitu kepentingan yang bersifat intern dan ekstern. Kepentingan intern adalah kepentingan ke dalam yang berkaitan dengan para anggota perkumpulan atau paguyuban, sedangkan kepentingan ekstern adalah kepentingan ke luar yang berkaitan dengan perkumpulan atau paguyuban itu sendiri. Adapun yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana perkumpulan atau paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan tersebut dapat melaksanakan kepentingan-kepentingannya, sehingga keberadaannya di daerah perantauan atau di perkotaan dapat menjadi wadah dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Kerangka Pemikiran

Di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan sebagainya, biasanya terdapat perkumpulan atau paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan. Keberadaan perkumpulan atau paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan ini sebenarnya merupakan strategi adaptasi dari kaum imigran dalam menghadapi lingkungannya yang baru, yaitu daerah perkotaan. Hal ini karena lingkungan yang dihadapi oleh kaum imigran di daerah perkotaan cenderung berbeda dengan lingkungan daerah asal mereka.

Adapun kata “paguyuban” itu sendiri sebenarnya berasal dari kata “guyub”, sebuah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya “bersama-sama” atau “kumpul”. Jadi kata “paguyuban” artinya adalah “perkumpulan”. Sedangkan kata “kedaerahan” artinya adalah sifat sederhana (Poerwadarminta, 1985). Dengan demikian “paguyuban kedaerahan” adalah

perkumpulan yang para anggotanya mempunyai sifat sederhana, atau dengan kat lain perkumpulan yang para anggotanya berasal dari daerah yang sama. Adapun yang dimaksud dengan “daerah” dalam tulisan ini dapat berarti kabupaten atau kota kabupaten, atau juga propinsi.

Paguyuban kedaerahan ini tentunya berbeda dengan paguyuban etnis, karena paguyuban yang disebut terakhir keanggotaannya didasarkan pada sukubangsa, sehingga dalam paguyuban etnis warna kulturalnya akan lebih jelas. Sungguhpun demikian, pengertian paguyuban kedaerahan dengan paguyuban etnis tersebut secara kultural seringkali berhimpitan, sehingga tidak mudah untuk membedakan apakah sebuah paguyuban merupakan paguyuban etnis atau paguyuban daerah. Untuk memudahkan pembahasan dalam tulisan ini, maka penulis hanya akan menggunakan istilah paguyuban saja. Kecuali apabila dalam pembicaraan ada keperluan untuk membedakan di antara keduanya.

Adapun yang dimaksud dengan “daerah perantauan” adalah suatu wilayah pemukiman yang cukup besar, padat dan permanen serta dihuni oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial heterogen. Menurut pendapat Wirth yang disitir oleh Khairuddin (1992) bahwa wilayah pemukiman seperti ini dinamakan kota. Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan “daerah perantauan” dalam tulisan ini adalah daerah perkotaan, utamanya kota daerah tingkat I atau kota propinsi. Hal ini karena kota propinsi biasanya menjadi tujuan bagi kaum imigran dalam mengadu nasib untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Para kaum imigran inilah yang pada akhirnya membentuk berbagai paguyuban di daerah perkotaan.

Hubungan-hubungan sosial yang terjadi di luar lingkungan paguyuban dan melintasi masyarakat sukubangsa di daerah perkotaan pada gilirannya telah mendorong perkembangan kebudayaan “pasar” atau daerah. Menurut Budhi Santoso (1997) bahwa kebudayaan daerah ini biasanya berkembang sebagai hasil perpaduan kebudayaan-kebudayaan masyarakat

majemuk yang menduduki suatu wilayah pemukiman bersama. Dalam perkembangannya, kebudayaan daerah ini diwarnai, kalau tidak didominasi, oleh salah satu kebudayaan sukubangsa yang mempunyai jumlah pendukung terbanyak, atau kebetulan telah mapan perkembangannya dan didukung oleh golongan masyarakat yang mempunyai sumber-sumber kekuasaan politik, ekonomi maupun sosial.

Sungguhpun telah berkembang kebudayaan daerah yang berfungsi sebagai kerangka acuan bersama, di daerah perkotaan juga telah berkembang kebudayaan yang telah digunakan sebagai kerangka acuan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu kebudayaan nasional. Namun demikian, karena perkembangan kebudayaan nasional ini belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan akan kerangka acuan dalam segala sektor kehidupan, maka seringkali orang cenderung mengacu pada kebudayaan daerah atau sukubangsanya sendiri. Dalam interaksi sosial antarsuku bangsa yang berbeda hal ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Sehubungan dengan itu maka upaya pembinaan terhadap masalah persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui paguyuban-paguyuban yang banyak bermunculan di daerah perkotaan.

D. Ruang Lingkup

Studi tentang Keberadaan Paguyuban-Paguyuban Etnis atau Kedaerahan di Daerah Perantauan ini dilakukan di Propinsi Kalimantan Barat, atau tepatnya di Kotamadya Pontianak (Peta 1). Dipilihnya Kotamadya Pontianak sebagai lokasi perekaman data karena selain sebagai ibukota propinsi, kotamadya tersebut juga merupakan daerah perantauan. Hal ini terlihat dari banyaknya para pendatang dari berbagai etnis maupun daerah yang bekerja dan tinggal menetap di sana. Pada umumnya para pendatang ini lalu membentuk paguyuban-paguyuban. Namun dalam tulisan ini hanya akan dibahas

sebuah paguyuban saja, yaitu paguyuban KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan). Dipilihnya ini sebagai sampel dalam kajian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya : (1) paguyuban KKSS sudah berdiri cukup lama, yaitu sejak tahun 1980 sehingga organisasinya sudah cukup mapan (2) mempunyai AD/ART (3) kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya terbatas untuk para anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat sekitar dan (4) keberadaan paguyuban tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat setempat.

Mengenai data yang akan direkam dalam tulisan ini di antaranya meliputi: lahirnya paguyuban dan perkembangannya, organisasi paguyuban dan berbagai kegiatan yang dilakukan; peranan paguyuban terhadap para anggotanya, baik yang mencakup kehidupan sosial, ekonomi, budaya maupun politik; peranan paguyuban terhadap masyarakat sekitarnya, seperti hubungan paguyuban dengan paguyuban lainnya, hubungan paguyuban dengan masyarakat lokal, hubungan paguyuban dengan pemda setempat, dan hubungan paguyuban dengan pemda asal.

Dengan lingkup materi seperti tersebut di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan keberadaan paguyuban KKSS di Kotamadya Pontianak sebagai arena dalam pembinaan persatuan dan kesatuan. Di samping itu, semua data yang sudah terekam diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi kebudayaan. Sehingga pada gilirannya dapat digunakan sebagai bahan masukan oleh instansi terkait dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan masalah persatuan dan kesatuan bangsa.

E. Metode Pengumpulan data

Satu di antara tahap-tahap penulisan yang harus dilakukan dalam kajian ini adalah pengumpulan data lapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu metode pengamatan dan wawancara.

Metode pengamatan difokuskan pada berbagai macam interaksi sosial yang terjadi di antara para pelaku, yaitu antar anggota paguyuban dan antara anggota paguyuban dengan orang-orang lain di luar paguyuban.

Metode wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara secara sambillalu dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara sambillalu adalah wawancara yang tidak direncanakan, sedangkan orang yang diwawancarai tidak diseleksi terlebih dahulu. Dengan cara ini, orang yang diwawancarai diharapkan dapat lebih terbuka sikapnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, sehingga dapat memberikan keterangan-keterangan apa adanya.

Wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dilakukan untuk menghindari melencengnya wawancara ke hal-hal yang tidak diinginkan, atau untuk mencegah terjadinya kealpaan terhadap berbagai hal yang perlu ditanyakan kepada informan. Adapun orang-orang yang dijadikan sebagai informan di antaranya : ketua paguyuban, para pengurus paguyuban, anggota paguyuban, dan beberapa tokoh masyarakat yang dipandang tahu tentang paguyuban KKSS.

Untuk memperkokoh dasar penulisan ini, maka penulis juga telah melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dikaji. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pengumpulan data lapangan.

F. Kerangka Laporan

Tulisan mengenai keberadaan paguyuban-paguyuban etnis di daerah perantauan ini kerangka penyajiannya dibagi menjadi beberapa kerangka dasar. Dalam Bab I diuraikan mengenai apa latar yang melahirkan usaha mengkaji dan menulisnya, permasalahan apa yang ingin dijelaskan, bagaimana kerangka pemikirannya, apa ruang lingkup dan tujuannya, metode apa yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan, serta bagaimana kerangka laporannya.

Pembicaraan dalam Bab II berkisar pada masalah paguyuban KKSS di Kotamadya Pontianak, sedangkan pemaparannya dilakukan dengan menggambarkan kondisi umum wilayah kajian, lahirnya paguyuban KKSS dan perkembangannya, organisasi paguyuban tersebut, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

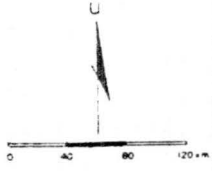
Mengenai peranan paguyuban KKSS terhadap anggotanya diuraikan dalam Bab III. Uraian tersebut mencakup peranan paguyuban dalam kehidupan sosial, peranan paguyuban dalam kehidupan ekonomi, peranan paguyuban dalam kehidupan budaya, dan peranan paguyuban terhadap kehidupan politik.

Dalam Bab IV dibicarakan mengenai peranan paguyuban terhadap masyarakat sekitarnya. Adapun yang menjadi pokok pembicaraan di antaranya : hubungan paguyuban dengan paguyuban lainnya, hubungan paguyuban dengan masyarakat lokal, hubungan paguyuban dengan Pemerintah Daerah setempat, dan hubungan paguyuban dengan Pemerintah Daerah asal.

Pembicaraan pada bab-bab terdahulu tersebut dianalisis dalam Bab V, sedangkan dalam penyajiannya diarahkan pada faktor-faktor yang dapat mendukung integrasi dan disintegrasi.

Tulisan ini diakhiri dengan kesimpulan yang dipaparkan dalam Bab VI.

PETA PROPINSI KALIMANTAN BARAT



LAUT CINA SELATAN



- KETERANGAN**
- — — — — Batas negara
 - - - - - Batas provinsi
 - - - - - Batas kabupaten
 - ⊙ Ibukota provinsi / kotamadya
 - ⊙ Ibukota kabupaten
 - Kota kecamatan
 - Tempat lain
 - Jalan
 - ~ Sungai
 - ▲ Gunung
 - ◊ Danau
 - ▨ Rawa

LAUT JAWA

BAB II

KKSS DI KODYA PONTIANAK

A Kodya Pontianak

1 Letak Atronomi, Geografi dan Pembagian Wilayah Administrasi

Kotamadya Pontianak adalah ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak terletak tepat pada garis Khatulistiwa yaitu pada posisi $0^{\circ}.02'.24''$ LU - $0^{\circ}.05'.37''$ LS dan $109^{\circ}.16'.25''$ BT - $109^{\circ}.23'.04''$ BT. Kotamadya Pontianak mempunyai ketinggian berkisar antara 0,10 - 1,5 meter DPL, sedangkan suhu berkisar antara $25,9^{\circ}$ - $27,7^{\circ}$ C.

Secara keseluruhan luas Kotamadya Pontianak adalah $107,82 \text{ km}^2$ dan terbagi menjadi 4 Kecamatan serta 22 Kelurahan. Adapun keempat kecamatan tersebut dengan luas masing-masing adalah sebagai berikut : Kecamatan Pontianak Barat, luas : $31,45 \text{ km}^2$, Kecamatan Pontianak Timur, luas : $8,78 \text{ km}^2$, Kecamatan Pontianak Selatan, luas : $29,37 \text{ km}^2$, dan Kecamatan Pontianak Utara, luas : $37,22 \text{ km}^2$ (Peta 2).

Dari data luas wilayah per kecamatan seperti yang terlihat di atas. Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Barat dan Pontianak Selatan mempunyai luas yang hampir sama. Sedangkan wilayah kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pontianak Timur yaitu $8,78 \text{ km}^2$ atau hanya 8,14 % dari seluruh luas kotamadya Pontianak.

Letak Kotamadya Pontianak berada di tengah-tengah atau dikelilingi wilayah Kabupaten Pontianak. Dengan kata lain, wilayah Kotamadya Pontianak berbatasan langsung dengan Kabupaten Pontianak. Kotamadya Pontianak berbatasan dengan Kecamatan Siantan di sebelah utara, Kecamatan Sungai Raya di sebelah timur dan di sebelah selatan, dan Kecamatan Sungai Kakap di sebelah barat.

Kotamadya Pontianak mendapat julukan sebagai kota Khatulistiwa. Sebagai kota yang dilalui oleh garis Khatulistiwa, Kotamadya Pontianak mempunyai suhu udara yang relatif panas, Kotamadya Pontianak ini juga mendapat curah hujan yang relatif tinggi tiap tahunnya. Tahun 1997, curah hujan yang tertinggi terjadi pada bulan April dan bulan Desember yaitu sebanyak 23 hari hujan dengan jumlah curah hujan 451 mm untuk bulan April dan 524 mm untuk bulan Desember. Sementara itu, suhu rata-rata adalah $25,9^{\circ}$ – $27,7^{\circ}$ C (Tabel 1).

Tabel 1
Hujan perhari, suhu dan curah Hujan

Bulan	Hujan (hari)	Suhu (rata-rata)	Curah hujan (mm)
Januari	14	25,9	135
Februari	11	25,5	161
Maret	12	26,9	172
April	23	26,7	451
Mei	11	27,4	337
Juni	10	27,3	220
Juli	5	27,0	206
Agustus	0	27,7	0
September	6	26,2	56
Oktober	16	26,2	250
Nopember	16	26,4	291
Desember	23	26,4	524

Sumber : Data Statistik Kotamadya Pontianak 1997

Kotamadya Pontianak, seperti daerah lain di Kalimantan Barat, mempunyai banyak sungai atau parit. Secara

keseluruhan jumlah parit yang ada di Kotamadya Pontianak sebanyak 33 buah parit. Selanjutnya, tanah yang ada di Kotamadya Pontianak terdiri dari berbagai jenis atau tipe yaitu organosol, gley, humus dan aluvial yang masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri.

Dalam hal penggunaan tanah, di Kotamadya Pontianak sebagian besar luas tanah yang ada dipergunakan untuk lahan kering yaitu sebesar 10.691 ha, sedangkan sisanya yaitu sebesar 91 ha dipakai untuk lahan sawah. Dari 10.782,00 ha lahan yang ada, sebagian besar dipakai untuk pemukiman yaitu seluas 5.467,38 ha atau 56,71 % sedangkan 1.465,68 ha atau 13,59 % ditumbuhi semak atau yang sekarang disebut lahan tidur. 1.293,71 ha atau 11,99 % merupakan kebun campur. Sisa lahan yang ada diperuntukkan bagi fasilitas-fasilitas umum seperti sarana perdagangan, pendidikan, peribadatan dan lain-lain (Tabel 2).

Tabel 2
Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	Luas (ha)	Prosentase (%)
Pemukiman	5.467,38	56,71
Pasar	10,35	0,09
Perdagangan	120,96	1,12
Perkantoran	134,38	1,25
Fasilitas Kesehatan	16,95	0,16
Fasilitas Peribadatan	25,80	0,23
Fasilitas Pendidikan	56,80	0,53
Perguruan Tinggi	161,50	1,87
Fasilitas Olah Raga	94,25	0,87
Perhubungan	197,95	1,83
Pergudangan	115,02	1,07
Pembangkit tenaga listrik	2,90	0,03
Industri	68,12	0,68
Kebun campur	1.293,71	11,99
Kebun karet rakyat	430,20	3,59
Semak	1.465,68	13,59
Hutan	349,30	3,24
Lain-lain	770,75	7,14
Jumlah	10.782,00	100,00

Sumber : Data Statistik Kodya Pontianak 1997

2. Fungsi kota

Kotamadya Pontianak merupakan ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Sebagai ibukota sebuah propinsi yang relatif luas, Kotamadya Pontianak mempunyai fungsi kota, baik bagi masyarakat yang ada di Kotamadya Pontianak maupun masyarakat yang ada di kabupaten-kabupaten di seluruh Kalimantan Barat. Sebagai pusat berbagai kegiatan, kotamadya Pontianak mempunyai fungsi sosial, budaya, dan ekonomi.

Sebagai kota yang berfungsi sosial, di Kotamadya Pontianak terdapat berbagai fasilitas-fasilitas sosial, misalnya kesehatan, rekreasi, dan fasilitas pendidikan yang cukup memadai. Informasi-informasi yang berkembang baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, bisa dipastikan melalui Kotamadya Pontianak, kecuali informasi yang berasal dari negara tetangga Malaysia (Serawak) yang mempunyai batas langsung dengan Propinsi Kalimantan Barat. Sebagai kota yang berfungsi budaya, Kotamadya Pontianak merupakan pusat dari kegiatan-kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Di Kotamadya ini terdapat gedung-gedung kesenian, misalnya Taman Budaya yang dapat menjadi ajang untuk kreatifitas warga masyarakat baik dari Kotamadya Pontianak sendiri maupun dari kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Sementara itu, sebagai kota yang mempunyai fungsi ekonomi, kotamadya Pontianak berperan besar dalam hal pendistribusian barang-barang kebutuhan yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat yang kesemuanya itu untuk memenuhi kebutuhan warga Kalimantan Barat seluruhnya. Di Kota Pontianak dapat ditemui berbagai sarang ekonomi yang dapat memperlancar proses perdagangan, misalnya pelabuhan laut antarpulau, pelabuhan udara, bank, perusahaan-perusahaan dan sebagainya.

3 Kependudukan

Jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 469.000 jiwa, terdiri dari 236.200 jiwa laki-laki dan 232.800 jiwa

perempuan. Apabila diperhatikan, maka pada kelompok usia 15-19 tahun jumlah jiwanya adalah yang paling banyak dibandingkan kelompok usia yang lain yaitu sebesar 64.489 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 31.474 jiwa penduduk laki-laki dan 33.015 jiwa penduduk perempuan. Adapun sex ratio terbesar didapatkan pada kelompok usia 20-24 tahun dengan angka 123, dimana pada kelompok usia ini jumlah penduduk laki-laki sebesar 31.889 jiwa dan jumlah penduduk perempuan adalah 25.853 jiwa (Tabel 3).

Tabel 3
Jumlah Penduduk dilihat dari Kelompok Umur

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
0 - 4	21.686	21.743	43.429	100
5 - 9	23.867	22.152	46.019	108
10 - 14	25.004	27.810	52.814	90
15 - 19	31.474	33.015	64.489	95
20 - 24	31.889	25.853	57.742	123
25 - 29	20.385	17.966	38.351	114
30 - 34	16.604	17.725	34.329	94
35 - 39	14.962	16.231	31.193	92
40 - 44	13.792	13.836	27.628	100
45 - 49	11.253	10.279	21.532	110
50 - 54	8.241	7.748	15.989	106
55 - 59	6.646	6.303	12.949	105
60 - 64	4.037	4.238	8.275	95
65 - 69	2.792	3.232	6.024	86
70 - 74	1.897	2.066	3.963	92
75 +	1.671	2.603	4.274	64
Jumlah	236.200	232.800	469.000	102

Sumber : Kantor Statistik Kodya Pontianak, 1997.

Kalimantan Barat, khususnya Kotamadya pontianak merupakan daerah multietnis pendatang. Tiap-tiap etnis pendatang mempunyai jumlah yang relatif besar. Pada tahun

1997 tampak bahwa jumlah pendatang di kodya Pontianak sebesar 13.630 jiwa. Dari jumlah itu, 7.537 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 6.093 jiwa perempuan. Angka pendatang di kodya Pontianak tersebut ternyata jauh lebih besar dari pada angka jumlah penduduk yang meninggalkan daerah ini yaitu sebesar 10.323 jiwa (Tabel 4).

Tabel 4
Jumlah Penduduk Yang Datang dan Pindah

Lahir		Mati		Datang		Pindah	
L	P	L	P	L	P	L	P
1.307	1.123	403	219	7.537	6.093	5.418	4.905

Sumber : Kantor Statistik Kodya Pontianak, 1997.

Apabila dilihat komposisi penduduk menurut mata pencaharian, dari 304.202 jiwa penduduk usia produktif, ternyata ada 185.520 jiwa penduduk yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 24,95 % atau 46.299 jiwa bekerja di bidang perdagangan, perhotelan dan rumah makan. Angka ini merupakan jumlah terbesar apabila dibandingkan dengan sektor lain. Fenomena ini tidak terlepas dari peranan kota dalam bidang ekonomi, seperti adanya beberapa buah hotel berbintang dan 53 buah hotel nonbintang. Penduduk yang bergerak di bidang jasa juga mempunyai prosentase relatif besar yaitu 24,5 % atau 45.491 jiwa, diikuti oleh sektor industri (10,17 %) dan sektor bangunan dan konstruksi (10,08 %). Walaupun dapat dikatakan luas lahan persawahan dan perkebunan masih relatif luas, namun penduduk yang bekerja di bidang pertanian hanya 2,49 % atau 4,627 % dari jumlah penduduk yang ada (Tabel 5).

Tabel 5
Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
Pegawai Negeri Sipil	13.800	7,44
ABRI	16.460	8,87
Pertanian	4.627	2,49
Pertambangan	357	0,19
Industri	18.880	10,17
Listrik, Gas, Air minum	2.313	1,25
Bangunan dan Konstruksi	18.693	10,08
Perdagangan dan perhotelan, restouran dan rumah makan	46.299	24,95
Angkutan dan komunikasi	15.666	8,44
Bank dan lembaga keuangan	2.934	1,58
Jasa dan lainnya	45.491	24,50
Jumlah	185.520	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kodya Pontianak, 1997.

Mengingat Kota Pontianak merupakan kota yang multietnis, maka dapat dipahami juga apabila terdapat keanekaragaman dalam hal agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh warga masyarakat. Dari total komposisi penduduk menurut agama, tampak bahwa sekitar 66,34 % dari keseluruhan penduduk adalah penganut agama Islam. Penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 4,08 %, Katolik 2,85 %, Hindu sebanyak 0,40 %. Angka yang agak banyak dimiliki oleh penganut agama Budha yaitu ada 23,68 %, sedangkan sisanya sebanyak 2,63 % adalah penganut aliran kepercayaan. Banyaknya pemeluk agama budha disebabkan banyak penduduk keturunan cina yang tinggal di Kodya Pontianak. Bahkan boleh dikatakan pada saat ini penduduk yang berlatar belakang etnis Cina merupakan penduduk terbesar di Kota Pontianak, yaitu lebih dari 30 % dari seluruh penduduk Pontianak (Tabel 6).

Tabel 6
Jumlah Penduduk menurut Agama

Agama / Aliran Kepercayaan	Jumlah	Prosentase
Islam	311.139	66,34
Khatolik	13.403	2,86
Kristen Protestan	19.148	4,08
Budha	111.052	23,68
Hindu	1.915	0,40
Aliran Kepercayaan	12.343	2,64
Jumlah	469.000	100,00

Sumber : Data Statistik Kotamadya Pontianak 1997.

Seiring adanya peranan kota dalam bidang sosial keagamaan, maka di kotamadya Pontianak terdapat 152 buah masjid dan 289 buah mushola. Di samping itu ada 9 buah gereja Khatolik dan 36 buah gereja Protestan serta 31 buah Vihara Budha.

Di samping adanya fungsi kota dalam bidang sosial untuk keagamaan, didapati pula fungsi kota dalam bidang sosial yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan. Di kotamadya Pontianak ini terdapat sebuah rumah sakit negeri dengan 309 buah tempat tidur dan sebuah rumah sakit swasta dengan 208 tempat tidur. Di samping itu sarana kesehatan lain adalah Puskesmas sebanyak 20 buah, 12 buah Puskesmas pembantu serta 12 buah Puskesmas keliling. Dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan Keluarga Berencana (KB), Kotamadya Pontianak dapat dikatakan berhasil mengingat program KB melampaui target yang dicanangkan. Dari 56.625 orang peserta program KB yang ditargetkan, ternyata pesertanya melampaui angka tersebut yaitu sebanyak 57.717 (102,41 %) pasangan usia subur. Angka ini terdiri dari peserta pemakai suntik 34,75 %, pemakai pil 30,78 %, pemakai IUD 28,55 %, pemakai MOP/MOW 3,39 %, kondom 1,73 %, implan 0,76 %, dan O.U 0,04 % (Tabel 7).

Tabel 7
Peserta KB dan alat kontrasepsi KB yang digunakan

Program KB	Jumlah Peserta	Prosentase
IUD	16.473	28,55
PIL	17.766	30,78
Kondom	1.001	1,73
Suntik	20.055	34,75
MOP/MOW	1.961	3,39
Implan	440	0,76
O.U.	21	0,04
Jumlah	57.717	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kodya Pontianak, 1997.

Dalam hal pendidikan, secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kotamadya Pontianak berpendidikan setaraf SMTA, baik yang umum maupun kejuruan. Penduduk yang masuk dalam kategori berpendidikan SMTA berjumlah 60.107 orang atau 38,72 %, sedangkan penduduk yang berpendidikan SMTP ada 27.469 orang atau 17,69 %. Angka tersebut hampir sama dengan penduduk yang berpendidikan SD yaitu 33.896 atau 21,84 %. Angka yang lebih rendah didapati dari penduduk yang berpendidikan Akademi dan Universitas yaitu masing-masing sebanyak 4.099 orang untuk Strata Akademi dan 8.944 orang untuk Strata Universitas (Tabel 8).

Tabel 8
Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Prosentase
Tidak pernah sekolah	5.508	3,55
Tidak / belum tamat SD	15.237	9,82
SD	33.896	21,84
SMTK umum / kejuruan	27.469	17,69
SMTA umum / kejuruan	60.107	38,72
Akademi	4.099	2,64
Universitas	8.944	5,76
Jumlah	155.260	100,00

Sumber : Kantor Statistik Kodya Pontianak, 1997.

Untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang cukup memadai. Tercatat ada sebuah sekolah taman kank-kanak (TK) Negeri dan 62 TK Swasta. Di samping itu ada 180 buah SD Negeri dan 47 buah SD Swasta. Untuk tingkat SMTP, ada 22 buah SMTP Negeri dan 59 buah SMTP Swasta. Untuk pendidikan Menengah Atas terdapat 9 buah SMU Negeri, 37 SMU Swasta, 6 buah SMTA Kejuruan Negeri dan 18 buah SMTA Kejuruan Swasta. Sementara itu, untuk pendidikan tinggi ada sebuah universitas negeri yaitu Universitas Tanjung Pura dan beberapa universitas swasta.

4 Berbagai Paguyuban di Kota Pontianak

Seperti telah disebutkan di atas kota Pontianak merupakan kota yang didiami oleh masyarakat yang mempunyai perbedaan etnis atau biasa disebut masyarakat multi etnis. Di Kotamadya Pontianak terdapat penduduk keturunan etnis Cina, Melayu, Jawa, Batak, Dayak, Bugis, dan sebagainya. Etnis Dayak dan Melayu yang merupakan penduduk asli Kalimantan Barat pada umumnya dan Pontianak pada khususnya sekarang ini jumlahnya relatif sama dengan penduduk yang berasal dari etnis lainnya atau etnis pendatang.

Para penduduk pendatang yang datang ke Pontianak dapat dikatakan berlangsung secara bertahap. Gelombang pertama kedatangan penduduk pada masa lampau dari luar Kalimantan Barat adalah berasal dari etnis Cina dan etnis Bugis. Suku Bugis memang merupakan suku yang senang merantau dan terkenal dengan pelautnya yang gagah berani. Kota Pontianak sejak dahulu merupakan daerah tujuan pelayaran orang-orang Bugis. Dalam pelayaran tersebut ada yang kembali ke daerahnya (di Sulawesi), tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya menetap di Pontianak. Gelombang pendatang selanjutnya adalah kedatangan penduduk dari Jawa dan Madura yang terjadi karena memang keinginan sendiri dan juga karena adanya program transmigrasi.

Pada saat sekarang ini (1998), kota Pontianak masih merupakan kota yang didiami oleh masyarakat yang multi etnis. Banyak alasan yang melatarbelakangi para pendatang yang ada di Pontianak. Alasan-alasan tersebut antara lain ingin merubah nasib hidupnya atau memang mendapatkan pekerjaan di Pontianak, mengikuti saudara mereka yang memang terlebih dahulu ada di Pontianak dan berbagai alasan lainnya. Dengan banyak etnis yang ada di Pontianak, menyebabkan adanya suatu kerinduan dari orang-orang tersebut untuk berkumpul dengan saudara-saudara mereka yang berasal dari satu etnis atau satu daerah, sehingga mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan kedaerahan atau perkumpulan etnis yang lazim disebut paguyuban.

Dewasa ini banyak perkumpulan atau paguyuban yang ada di Pontianak, misalnya KKSS dari Sulawesi Selatan, S Opat dari Etnis Sunda, PKMB (Persatuan Keluarga Besar Madura) dan beberapa perkumpulan kecil-kecil yang tidak mempunyai nama, hanya sekedar perkumpulan arisan atau latihan kesenian, misalnya bisa disebutkan disini PAKUWOJO (pakumpulaning wong Jowo = perkumpulannya orang Jawa) dari etnis Jawa.

B. Sejarah Singkat Paguyuban KKSS di Kalimantan Barat

Di atas telah disebutkan bahwa di Kota Pontianak terdapat banyak etnis yang berlainan. Mereka juga membentuk perkumpulan-perkumpulan atau paguyuban. Etnis Bugis di Kota Pontianak termasuk kelompok yang besar dalam jumlah anggotanya, baik yang keturunan maupun yang memang dari Sulawesi Selatan yang merantau ke Pontianak. Mereka membentuk semacam perkumpulan yang sekarang ini diberi nama dengan KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan).

Terbentuknya KKSS diawali dengan munculnya embrio yang bernama PKS (Persatuan Keluarga Sulawesi). Perkumpulan ini merupakan perkumpulan orang-orang Sulawesi yang ada di Kalimantan Barat. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini merupakan perkumpulan dari seluruh masyarakat Sulawesi, baik itu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. PKS didirikan oleh Haji Muin yang dibantu oleh Haji Jalil, Andi Odang dan Max Muin.

Perkumpulan ini bertujuan untuk membuat wadah berkumpul orang-orang Sulawesi yang ada di Kalimantan Barat dan dipakai sebagai ajang komunikasi diantara mereka. Tujuan lain adalah untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga Sulawesi serta membantu warga Sulawesi yang merantau ke Kalimantan Barat.

Dalam perjalanannya PKS akhirnya bubar karena masing-masing daerah ingin membentuk perkumpulan sendiri. Hal lain yang menyebabkan bubarnya PKS adalah semakin banyaknya warga masyarakat dari Sulawesi yang berada di Kalimantan Barat. Untuk lebih mengoptimalkan tujuan dari perkumpulan, maka para pengurus yang terdiri dari berbagai daerah tersebut sepakat untuk mendirikan perkumpulan-perkumpulan sendiri-sendiri sesuai daerahnya masing-masing.

Sebagai langkah lebih lanjut dari bubarnya PKS, maka pada tahun 1967 dibentuklah KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) dengan Ketua Umumnya yang pertama Bapak Haji

Andi Sayuti. Dalam ketentuannya, Ketua Umum dijabat selamat 2 tahun dengan syarat dapat dipilih lagi selama 3 periode.

Dari tahun 1967 sampai sekarang telah berganti beberapa kali ketua umum, dan yang terakhir menjabat sebagai Ketua Umum adalah Bapak Haji Kadir Ubbe.

C. Organisasi Paguyuban KKSS

Sebagai suatu perkumpulan yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai ikatan primordial, tentu saja mempunyai suatu tujuan tertentu, khususnya untuk para anggotanya. Seperti paguyuban-paguyuban lainnya, KKSS juga mempunyai tujuan yang ingin mereka raih dengan adanya pembentukan paguyuban tersebut di daerah rantau. Adapun tujuan paguyuban KKSS adalah sebagai berikut :

1. Untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggotanya
2. Menciptakan hubungan kekeluargaan yang baik, saling kenal mengenal serta mempererat kerja sama antar anggota-anggotanya.
3. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari budaya nasional.
4. Menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian warga Sulawesi Selatan dimana saja, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai insan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Sebagai suatu paguyuban, KKSS hidup dari partisipasi anggota-anggotanya. Keanggotaan dalam paguyuban KKSS dibedakan menjadi dua yaitu To Sulesana (warga kehormatan) dan anggota biasa. Ada kriteria tertentu untuk seorang anggota, sehingga seseorang dapat dimasukkan dalam anggota jenis apa. Kriteria tersebut adalah :

1. To Sulesana (warga kehormatan) adalah seseorang yang memiliki kearifan dan dipandang layak karena jasa dan pengabdianya pada organisasi KKSS dan kemajuan pembangunan masyarakat Sulawesi Selatan.
2. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan atau pernah bermukim di Sulawesi Selatan atau setiap orang yang bersimpati dan yang di dalam kehidupannya telah menyerap serta menerima nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan sehingga nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Sulawesi Selatan.

Setiap anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para anggota biasa tersebut adalah sebagai berikut :

Hak setiap anggota :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dalam organisasi
2. Berbicara dan memberi suara dalam rapat-rapat/musyawarah KKSS serta mengemukakan usul-usul/saran-saran yang bersifat positif ke arah perbaikan organisasi.
3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dalam Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang.
4. Memperoleh perlindungan, pembinaan dan bimbingan dalam organisasi di semua tingkat.

Sedangkan kewajiban para anggota adalah :

1. Tunduk dan taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan serta keputusan organisasi.
2. Memberi bantuan moril dan materiil kepada organisasi KKSS serta menyukseskan setiap usaha pelaksanaan maksud dan tujuan organisasi.

3. Senantiasa ikut serta menjaga nama baik organisasi KKSS dan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Dalam perjalanannya, suatu perkumpulan pastilah mempunyai suatu kepengurusan, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Sebagai suatu paguyuban yang sudah cukup mapan, paguyuban KKSS juga mempunyai kepengurusan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Susunan organisasi KKSS adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengurus Pusat (Tingkat seluruh Indonesia) disingkat BPP KKSS.
2. Badan Pengurus Wilayah (Tingkat Propinsi) disingkat BPW KKSS.
3. Badan Pengurus Cabang (Tingkat Kodya atau Kapupaten) disingkat BPC KKSS.

Komposisi kepengurusan diatur sebagai berikut :

1. Badan Ekstra Struktural terdiri atas :
 - (a) To Sulesana (Warga Kehormatan) terdapat diseluruh Tingkatan dan (b) Dewan Pertimbangan terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota terdapat di seluruh tingkatan.
2. Badan Pengurus Pusat (BPP) terdiri dari :
 - (a) Ketua Umum, (b) Wakil Ketua Umum, (c) Ketua-ketua, (d) Sekretaris Jenderal, (e) Wakil Sekretaris Jenderal, (f) Bendahara Umum, (g) Wakil-wakil Bendahara, dan (h) Ketua-ketua dan Wakil-wakil Departemen.
3. Badan Pengurus Wilayah (BPW) terdiri dari :
 - (a) Ketua, (Gambar 1) (b) Wakili-wakil Ketua, (c) Sekretaris, (Gambar 2) (d) Wakil-wakil Sekretaris, (e) Bendahara, (f) Wakil-wakil Bendahara, dan (g) Ketua-ketua biro dan wakil-wakil ketua biro.

4. **Badan Pengurus Cabang (BPC) terdiri dari :**

(a) **Ketua**, (b) **Wakil-wakil ketua**, (c) **Sekretaris**, (d) **Wakil-wakil sekretaris**, (e) **Bendahara**, (f) **Wakil-wakil Bendahara**, dan (g) **Ketua-ketua bagian dan wakil-wakil ketua bagian**.

D. Kegiatan-kegiatan Paguyuban KKSS

Sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi KKSS, diharapkan bahwa organisasi dapat berguna bagi kehidupan para anggota-anggotanya baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka kegiatan-kegiatan organisasi diarahkan pada ketiga hal tersebut.

Kegiatan sosial meliputi gotong-royong apabila ada anggota yang melaksanakan perhelatan misalnya kematian atau perkawinan dan juga menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan, misalnya Idul Fitri atau Natal. Gotong-royong juga dilaksanakan untuk kepentingan umum, misalnya membersihkan parit-parit yang ada di Kotamadya Pontianak, aksi kebersihan pasar dan sebagainya. Kegiatan lainnya yaitu aksi donor darah, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, melaksanakan pertandingan sepak takraw se Kalimantan Barat. Bisa juga dicatat disini bahwa dalam rangka menciptakan suasana silaturahmi, paguyuban memprakasai acara syukuran dan penyambutan/pelepasan bagi warga yang mendapat promosi/mutasi. Paguyuban juga memberi perhatian terhadap setiap warga Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Barat. Misalnya, memberikan bantuan akomodasi bagi Ekspedisi Pelayaran Akademis UNHAS (Universitas Hasanudin) dalam pelayaran tradisional "Perahu Sandeg" keliling negara-negara ASEAN. Disamping itu, juga memberi bantuan kepada Tim MAPALA UMI Ujung Pandang yang melakukan ekspedisi ke Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat yang terdiri dari berbagai etnis, memang rentan terhadap gesekan-gesekan yang dapat mengakibatkan kerusuhan antaretnis. Pada tahun 1997 terjadi kerusuhan

antara etnis Madura dan etnis Dayak. Dalam peristiwa kerusuhan tersebut, paguyuban KKSS ikut terlibat membantu aparat keamanan dan Pemerintah Daerah dalam penanganan pasca kerusuhan. Paguyuban KKSS mengambil bagian pada proses penyusunan Naskah Pernyataan Bersama/Kebulatan Tekad dan keprihatinan terhadap keadaan yang terjadi. Surat pernyataan bersama tersebut ikut mendorong dan menggerakkan lahirnya kesepakatan untuk menyelenggarakan upacara adat/perdamaian diantara kedua suku yang bertikai.

Kegiatan di bidang budaya meliputi penyelenggaraan kursus-kursus menari tarian Sulawesi Selatan. Menyelenggarakan acara-acara kesenian yang dirangkaikan dengan acara-acara keagamaan, misalnya penampilan para penari tradisional Sulawesi Selatan pada saat acara halal bi halal. Sementara itu, dalam kegiatan yang berhubungan dengan bidang ekonomi, paguyuban ini menyelenggarakan koperasi simpan pinjam dan memberi bea siswa bagi anak yang tidak mampu atau mencarikan orang tua asuh bagi anak yang kurang mampu, tetapi mempunyai potensi untuk melanjutkan pendidikannya.

Gambar 2
KOTAMADYA PONTIANAK

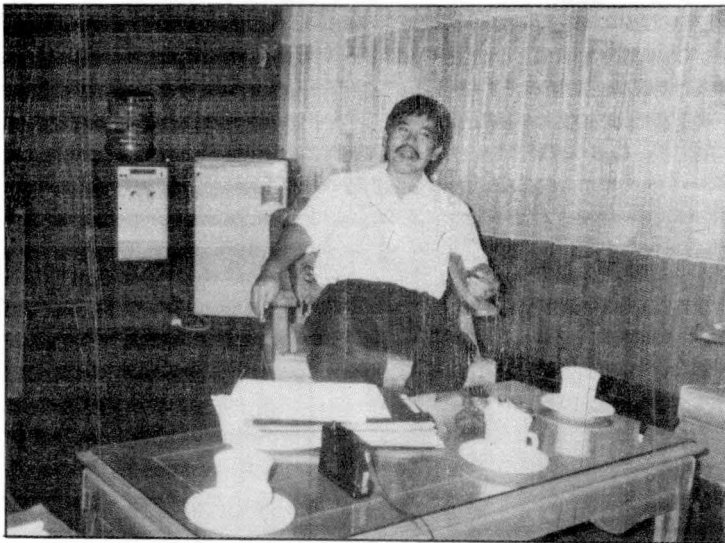
Skala 1: 50.000

0 1 2 km





Gambar 1 : H. A. Kadir Ubbe SH. Ketua BPW KKSS Kotamadya Pontianak periode



Gambar 2 : Ir. M. Anugerah ali Anwar, Sekretaris BPW KKSS Kotamadya Pontianak periode 1996-2000

BAB III

PERANAN PAGUYUBAN TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTANYA

Ada kecenderungan tertentu yang dilakukan oleh manusia untuk mencari atau bergaul lebih intensif dengan orang lain yang mempunyai latar belakang yang sama, misalnya suku, asal daerah atau agama. Hal itu juga dialami oleh masyarakat Sulawesi Selatan yang hidup di perantauan seperti di kota Pontianak. Di Kota Pontianak pada khususnya atau Kalimantan Barat pada umumnya, orang-orang dari Sulawesi Selatan memang sudah lama ada dan berdiam di antara para pendatang lainnya. Sejak ratusan tahun yang lampau, orang-orang Sulawesi Selatan telah merantau ke Kalimantan Barat. Sebagai pelaut yang ulung, orang-orang Sulawesi Selatan telah menjelajahi seluruh Nusantara bahkan sampai ke manca negara.

Dengan adanya keinginan untuk hidup dan bergaul dengan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sama, orang-orang Sulawesi Selatan membutuhkan suatu wadah yang dapat mempersatukan mereka. Kemudian, tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang sudah lama menetap di Kalimantan Barat membuat suatu perkumpulan atau paguyuban yang dapat mempersatukan masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Barat. Sampai sekarang ini perkumpulan tersebut masih eksis dan berkembang dengan baik.

Tumbuh dan berkembangnya suatu perkumpulan atau paguyuban ditentukan oleh aktivitas para anggotanya. Aktivitas para anggota akan lebih berkembang apabila ada suatu kepengurusan dari paguyuban yang dapat mengakomodasikan seluruh kepentingan para anggota. Jadi di sini terlihat adanya hubungan yang erat antara paguyuban sebagai wadah perkumpulan dan para anggota sebagai pendukung paguyuban serta kepengurusan paguyuban sebagai “mesin” dari paguyuban. Paguyuban akan sangat dirasakan manfaatnya dan tidak ditinggalkan para anggota, apabila keberadaan paguyuban tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi kehidupan para anggota. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa suatu paguyuban harus mempunyai peranan yang dapat membantu para anggota paguyuban dalam kehidupannya, baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik.

A Kehidupan Sosial

Sebagai suatu perkumpulan di daerah rantau, suatu paguyuban akan sangat berperan dalam mengakomodasikan kepentingan-kepentingan para anggotanya. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) sebagai suatu paguyuban mempunyai kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh para anggotanya, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh pengurus paguyuban. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KKSS antara lain kerja bakti membersihkan parit, donor darah atau kegiatan gotong-royong lainnya.

Secara sosial-psikologis, keberadaan paguyuban sangat dirasakan oleh para anggota terutama yang baru datang ke Kalimantan Barat. Ada perasaan tentram dalam batinnya dan merasa terlindungi kehidupan sosialnya apabila seseorang masuk menjadi anggota KKSS. Perasaan aman tentram tersebut dapat dilihat pada pengakuan informan kami dibawah ini :

Pertama kali saya datang ke Pontianak, yang saya cari adalah KKSS. Pada saat saya masih di Ujung Pandang saya mendapat informasi bahwa di setiap provinsi di Indonesia ada KKSS dan saya disarankan untuk menghubungi KKSS

di Pontianak. Benar juga akhirnya saya menemukan KKSS di kota ini sehingga saya aktif bergaul di sini (paguyuban) bahkan menjadi pengurus KKSS. Sebagai orang saya menemukan suatu ketenangan batin apabila saya dapat berkumpul dengan saudara-saudara yang berasal dari Sulawesi Selatan yang ada di Pontianak. Di samping itu, apabila ada masalah-masalah dapat kita hadapi bersama-sama sehingga saya tidak merasa sendirian lagi.

Dari pengakuan informan tersebut dapat kita lihat betapa begitu berartinya keberadaan paguyuban bagi anggota-anggotanya. Paguyuban, secara umum dapat menggantikan nilai-nilai yang dahulu dimiliki para anggota di daerah asalnya. Suasana kekeluargaan yang dirasakan oleh para anggota paguyuban menjadikan seseorang merasa hidup di kampung halamannya sendiri.

Adanya perasaan tenang dan merasa mendapat perlindungan tidak hanya dirasakan oleh para anggota yang berasal dari Sulawesi Selatan tetapi juga dirasakan oleh anggota yang lahir di Pontianak. Anggota yang termasuk dalam kategori ini memandang perlu bagi dirinya untuk ikut dalam paguyuban KKSS. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari mereka sudah akrab bergaul dengan masyarakat asli Pontianak, misalnya dari suku Melayu, tetapi bagi mereka ada suatu "kebutuhan sosial" dan "kerinduan budaya" yang mendorongnya untuk ikut dalam paguyuban KKSS. Hal itu dapat dilihat dari penuturan informan dari Sulawesi Selatan, yang sebetulnya secara sosial budaya dia telah merasa sebagai penduduk asli Pontianak dari suku Melayu.

Saya orang Sulawesi Selatan yang lahir di Pontianak. Orang tua berasal dari sana yang merantau ke Pontianak sini. Saya tertarik masuk menjadi anggota paguyuban KKSS karena saya ingin mengetahui adat-istiadat serta kebiasaan Sulawesi Selatan. Dengan banyak bergaul dengan orang Sulawesi Selatan yang ada di sini saya bisa mengetahui tentang adat istiadat nenek moyang saya. Di samping hal itu saya merasa kalau saya ikut paguyuban KKSS maka teman saya bertambah, maksud saya teman yang mempunyai latar belakang yang sama yang selalu siap

menolong saya dalam keadaan apapun, misalnya kalau saya mengalami permasalahan.

Dalam kehidupan sosial lainnya, paguyuban juga mempunyai peranan bagi anggota-anggotanya, misalnya dalam hal kematian, perkawinan ataupun acara-acara lainnya. Dalam hal peristiwa perkawinan dan kematian, peranan paguyuban meliputi gotong royong dalam mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut acara tersebut, misalnya pemasangan tenda, penataan kursi dan lain-lainnya. Dalam hal perkawinan, tidak jarang ada anggota yang dalam melangsungkan perkawinannya segala sesuatunya diurus oleh paguyuban.

Informan kami seorang yang berasal dari Toraja Sulawesi Selatan yang merantau ke Kalimantan Barat. Pertama kali sampai ke Pontianak, dia menumpang di rumah salah satu anggota paguyuban Entalu (Enrekang - Tana Toraja - Luwu, yang merupakan salah satu pilar dari paguyuban KKSS). Di Pontianak informan kami menemukan jodohnya yang sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan. Karena jarak antara Sulawesi Selatan dan Pontianak dirasa sangat jauh, maka dia melangsungkan perkawinannya di Pontianak. Segala sesuatu yang menyangkut acara pernikahan dari peminangan sampai pesta perkawinan semua diurus oleh anggota-anggota paguyuban. Informan kami sangat terkesan dengan peristiwa tersebut. Dia berkata : "saya merasa betapa paguyuban sangat berperan bagi saya dan sampai sekarangpun peristiwa itu tidak akan saya lupakan". Sebagai perwujudan dari rasa terkesannya tersebut sampai sekarang informan kami menyediakan diri menjadi tempat "berteduh" bagi orang-orang yang berasal dari Sulawesi Selatan yang merantau ke Kalimantan Barat.

Di samping adanya perhatian dari para anggota paguyuban terhadap anggota lain yang tertimpa musibah kematian, perkawinan ataupun hajat lainnya, paguyuban secara khusus memberi sumbangan bagi yang bersangkutan. Peranan paguyuban terhadap anggota yang sedang mempunyai hajat tertentu dapat dilihat dari penuturan informan di bawah ini :

Perkumpulan akan memberikan sekedar perhatian terhadap para anggota yang mempunyai hajat tertentu.

Anggota yang meninggal akan mendapat santunan sebesar Rp 50.000, baik itu Bapak, Ibu, atau anak-anaknya. Jadi meliputi lingkup tersebut atau keluarga inti yang mendapat santunan. Apabila ada misalnya mertua dari anggota yang meninggal, paling melayat. Akan tetapi melayatpun sudah otomatis menyumbang. Dan juga kalau ada acara perkawinan atau keramaian lainnya, pasti tanpa dimintapun KKSS akan turun tangan mengurus segala keperluan yang sekiranya dapat dilakukan. Juga ada kebijaksanaan-kebijaksanaan dari KKSS untuk memberikan kenang-kenangan kepada anggota yang melangsungkan pernikahan. Begitu juga terhadap anggota yang pindah tugas atau baru masuk menjadi anggota akan disambut dalam suatu acara silaturahmi.

Kotamadya Pontianak secara sosial budaya dan ekonomi merupakan jantung Kalimantan Barat. Segala aktifitas yang terjadi di Kalimantan Barat pada umumnya tertumpu di kota Pontianak. Bagi masyarakat atau anggota KKSS yang bertugas di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, kota Pontianak merupakan tempat yang paling cocok untuk menghabiskan musim liburan sekolah kalau memang tidak bisa berlibur ke Jawa atau pulang mudik ke daerah asalnya Sulawesi Selatan. Banyak anggota KKSS yang bermukim menyebar di seluruh Kalimantan Barat. Di antara mereka banyak yang bekerja sebagai guru di pedalaman Kalimantan Barat. Pada musim liburan sekolah, otomatis mereka juga libur. Pada saat seperti itu, mereka mempunyai dua pilihan, apakah tetap tinggal di Kalimantan Barat atau pulang ke Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan musim liburan. Banyak di antara mereka yang karena berbagai alasan tidak bisa pulang ke Sulawesi Selatan, sehingga sebagai gantinya berlibur ke kota Pontianak. Apabila hal itu terjadi, maka paguyuban KKSS yang ada di Pontianak memberikan fasilitas tempat tinggal bagi mereka, biasanya di Sekretariat KKSS. Mereka (para anggota KKSS yang bermukim di kabupaten-kabupaten) akan ditampung di rumah-rumah keluarga para anggota KKSS yang ada di Pontianak. Tidak jarang paguyuban KKSS yang ada di Kota Pontianak membuat suatu acara bagi mereka.

Dalam berbagai kasus terlihat bahwa paguyuban memberikan suatu “pelayanan sosial” bagi para anggotanya. Pernah suatu ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap salah satu anggota KKSS yang bertugas sebagai tentara Den Kav 2 Korem VI Tanjungpura. Paguyuban mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan musibah kematian mulai dari mengurus jenasahnya di rumah sakit sampai kepada acara pemakamannya sendiri. Dalam kasus lain, paguyuban juga memberi perhatian kepada anggotanya yang menderita sakit karena dianiaya oleh seseorang. Paguyuban melayangkan surat kepada Kapolres (Kabupaten) Sambas untuk segera mengusut peristiwa tersebut supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Paguyuban KKSS mempunyai beberapa macam peran bagi para anggotanya. Pada suatu ketika, paguyuban dapat menjadi “pelayan sosial”, di saat lain paguyuban dapat menjadi “corong” bagi para anggota untuk mengemukakan pendapat ataupun tuntutan bagi pemerintah ataupun instansi yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Hal itu bisa dilihat pada peristiwa yang pernah terjadi yang menyangkut kepentingan umum. Pada waktu lalu terdapat rute pelayaran langsung antara Sulawesi Selatan dan Pontianak. Pelayaran yang dilakukan oleh PELNI tersebut sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Pontianak. Mereka akan dengan mudah pulang mudik ke Sulawesi Selatan dan kembali ke Pontianak. Pada saat ini trayek pelayaran PELNI tersebut telah dicabut. Hal itu menyebabkan kekecewaan warga Sulawesi Selatan yang senantiasa mempergunakan jasa pelayanan transportasi tersebut. Untuk kasus tersebut, paguyuban KKSS telah melayangkan surat permohonan kepada Direktur Utama PELNI agar trayek pelayaran tersebut dibuka kembali karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama warga dari Sulawesi Selatan. Permohonan tersebut ternyata sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh DPR RI dan diharapkan dapat dikabulkan demi untuk kepentingan masyarakat banyak.

Dalam kehidupan sosial keagamaan, peran paguyuban juga sangat dirasakan oleh para anggotanya. Paguyuban KKSS memberikan suatu kesempatan dan mendukung acara-acara atau perayaan-perayaan yang dilakukan oleh para anggotanya. Seperti diketahui, di dalam paguyuban KKSS terdapat berbagai macam anggota yang mempunyai latar belakang suku dan agama yang berlainan. Sebagai contoh, misalnya suku Bugis mayoritas beragama Islam, sedangkan suku Toraja mayoritas beragama Kristiani (Kristen/Katolik). Pada saat perayaan agama Islam (Idul fitri/Halal Bil Halal), anggota-anggota yang berasal dari Toraja datang mengikuti acara tersebut. Begitu juga sebaliknya kalau ada anggota (terutama dari suku Toraja) merayakan Natal, banyak anggota yang beragama Islam datang menghadiri perayaan tersebut. Di sini terlihat bahwa peran paguyuban begitu besar. Di dalam "payung" paguyuban, perbedaan-perbedaan yang ada baik suku maupun agama tidak menjadi permasalahan, bahkan terlihat adanya persatuan di antara para anggota yang berbeda suku dan agamanya.

Acara sosial lain yang dilaksanakan oleh paguyuban untuk anggota-anggotanya adalah acara arisan. Arisan diselenggarakan sebulan sekali dikoordinir oleh pengurus IWWS (Ikatan Wanita Sulawesi Selatan-salah satu pilar KKSS). Tempat dan penyelenggaraan arisan bergiliran dari rumah ke rumah, siapa yang mendapat arisan, dialah yang menjadi penyelenggara berikutnya. Arisan secara sosial sangat dirasakan manfaatnya oleh para anggota seperti dituturkan oleh informan di bawah ini :

"Ikut arisan dapat memperkokoh rasa persaudaraan. Dengan bertemu kita bisa mengkomunikasikan berbagai hal tentang perkembangan situasi sosial masyarakat pada umumnya, perkembangan situasi sosial ekonomi dan segala macam hal yang mewarnai hidup kita. Pengalaman-pengalaman dari anggota lain dapat menjadi pelajaran yang berharga".

B. Kehidupan Ekonomi

Paguyuban KKSS yang ada di Kalimantan Barat mempunyai program kerja di bidang ekonomi disesuaikan dengan program kerja dari pusat. Program kerja dari KKSS Pusat dalam bidang kesejahteraan sosial antara lain sebagai berikut :

1. Menginventarisasi mata pencaharian/pekerjaan anggota, kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sejenis dan dibentuk wadah bersama berupa koperasi dan bentuk perusahaan swasta lainnya dan dikembangkan berdasarkan peluang yang dapat dikoordinasikan dengan program pemerintah.
2. Menginventarisir pekerjaan/kedinasan warga yang merupakan pegawai pemerintah dan swasta kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sejenis, dan diupayakan untuk ditingkatkan lewat pelatihan dan koordinasi upaya perbaikan massal dan jabatan, diupayakan dari warga untuk warga dan oleh warga KKSS sendiri.
3. Mengupayakan kemitraan warga anggota KKSS, yang kuat, menengah, dan lemah untuk saling membantu.
4. Mengupayakan panti asuhan bagi jompo dan anak yatim.
5. Mengupayakan bea siswa bagi pelajar, mahasiswa yang berprestasi dan atau tidak mampu untuk melanjutkan studinya.
6. Mengupayakan bantuan dan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga dan anaknya yang berprestasi yang menonjol pada bidang-bidang tertentu, yang berpotensi untuk dikembangkan.
7. Mengupayakan bantuan dalam bentuk penyediaan dan atau penciptaan lapangan kerja bagi yang putus sekolah atau belum bekerja.

Dalam kegiatan sehari-hari, paguyuban KKSS di Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan program kerja dari KKSS Pusat. Kegiatan itu antara lain dalam bidang koperasi dan pendidikan serta membimbing pekerjaan dari para anggota-anggotanya. Dalam hal bimbingan yang berhubungan dengan mata pencaharian anggota, telah dilakukan oleh paguyuban KKSS telah melakukannya di Pulau Kabung (Kabupaten Sambas). Di Pulau Kabung, terjadi suatu kemundakan ekonomi yang dialami oleh para nelayan akibat adanya permainan dari tauke Cina. Para pengurus KKSS berusaha untuk memberantas praktek-praktek tersebut agar kehidupan ekonomi nelayan di sana mengalami perkembangan. Berkaitan permasalahan ekonomi yang dialami oleh para nelayan di Pulau Kabung, seorang informan mengemukakannya seperti di bawah ini :

“Ada kasus di Pulau Kabung (ada banyak anggota KKSS di sana). Ada masalah mendasar yang dialami oleh para nelayan. Kami melihat ekonomi rakyat (nelayan) kelihatan begitu-begitu saja tidak ada peningkatan. Di sini kami melihat perlu adanya intervensi manajemen, maklum pendidikan mereka rendah. Kemudian mekanisme pasar mereka sangat tergantung pada praktek “iion” (tengkulak) Cina. Kami melihat misalnya harga ikan teri pada waktu (1998) itu Rp 9.000 per kilo. Oleh tauke Cina dibayar lebih rendah dari harga tersebut karena si nelayan bergantung pada pasokan sembilan bahan pokok dari tauke tersebut. Kalau harga terinya dihitung dengan harga yang ditekan, harga barang-barang dari tauke Cina ditinggi-tinggikan sedemikian rupa. Jadi sepertinya tidak ada satu nilai sisa dari penjualan yang bisa ditabungnya. Praktek-praktek inilah yang perlu menjadi bahan perhatian kita”.

Sesuai dengan program kerja dari KKSS Pusat yang berhubungan dengan mata pencaharian, maka di lingkungan KKSS Pontianak juga telah dilaksanakan pembinaan terhadap mata pencaharian para anggota. Sebagai pelaut yang handal, masyarakat Sulawesi Selatan secara turun temurun mempunyai keahlian yang berhubungan dengan kehidupan bahari. Begitu juga di Pontianak juga ada perkumpulan yang bergerak di

dalam bisnis pelayaran yang para anggotanya mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan. Perkumpulan tersebut bernama PERLA (Pelayaran Rakyat). Para pemimpin PERLA tersebut kebetulan juga merupakan pengurus KKSS Kalimantan Barat. perkumpulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan para pelaut dari Sulawesi Selatan. Selain itu, perkumpulan ini membina serta mempertahankan tradisi kelautan yang selama ini sudah menjadi tradisi masyarakat Sulawesi Selatan. Hampir semua anggota PERLA menjadi anggota paguyuban KKSS, sehingga ada suatu hubungan yang erat antara KKSS dan PERLA tersebut. Para anggota PERLA mengekspresikan kehidupan sosial ekonomi dan budayanya melalui paguyuban KKSS yang ada di Pontianak.

Dalam program kesejahteraan sosial ekonomi dari KKSS Pusat juga disebutkan, bahwa Pengurus Paguyuban yang ada di daerah harus senantiasa mengarahkan program-programnya pada tempat yang memang menjadi prioritas dan sedapat mungkin menyesuaikan dengan program pemerintah. Menindaklanjuti dari program tersebut, paguyuban tengah mengadakan proyek kelistrikan bekerja sama dengan Kanwil Departemen Pertambangan Dan Energi Kalimantan Barat. Proyek tersebut dilaksanakan di Pulau Kabung juga. Proyek tersebut bertujuan untuk mengadakan program kelistrikan dengan menggunakan teknologi tenaga surya. Dengan adanya penerangan yang memadai, maka secara otomatis kehidupan sosial ekonomi penduduk akan meningkat juga. Diharapkan dengan adanya listrik masuk desa tersebut, arus informasi dan arus perdagangan akan lebih meningkat masuk ke Pulau Kabung.

Dalam hal perkoperasian telah dibentuk suatu koperasi serba usaha/simpan pinjam yang dapat berguna bagi kelancaran usaha dari para anggota KKSS. Koperasi ini sudah berbadan hukum atau sudah mendapat ijin prinsip dan layak diberi bantuan menurut penilaian Ketua Pusat Koperasi Serba Guna KKSS Pusat. Koperasi ini juga akan mendapat bantuan modal kerja dan investasi sebesar Rp 100 juta dari Bp. H. Andi Sose (seorang pengusaha dari Sulawesi Selatan yang bermukim di Jakarta).

Dalam bidang ekonomi pendidikan, paguyuban berperan aktif bagi para anggotanya. Paguyuban menginventarisir anak-anak yang kurang mampu dalam hal ekonomi, tetapi mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan kemauan belajar yang keras. Anak tersebut dapat menjadi anak asuh dari anggota KKSS yang mampu secara ekonomi. Begitu pula apabila ada anggota paguyuban yang ingin melanjutkan sekolah S2 (pasca sarjana), pengurus paguyuban akan memberikan rekomendasi ke yayasan Pendidikan Latimojong (salah satu yayasan dari KKSS Pusat) untuk mendapatkan bea siswa bagi yang bersangkutan. Dalam kiprahnya selama ini, KKSS di kota Pontianak telah beberapa kali memberikan rekomendasi bagi sarjana dari Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Barat untuk melanjutkan sekolah S2 (pasca sarjana).

C. Kehidupan Sosial

Budaya walaupun mempunyai arti yang luas, seringkali hanya ditekankan pada aktivitas manusia yang berhubungan dengan kesenian dan adat istiadat. Oleh karena dibebani masalah penghidupan (sosial ekonomi) di rantau, maka orang Sulawesi Selatan di Kalimantan Barat kurang perhatian pada persoalan budaya.

Sebetulnya program kerja yang telah digariskan oleh pengurus KKSS Pusat dalam bidang budaya cukup representatif untuk melestarikan budaya Sulawesi Selatan sebagai bagian dari budaya nasional, tetapi pelaksanaan di daerah masih belum seperti apa yang diharapkan. Hal itu terkait erat dengan segi sarana, prasarana, dan dana yang masih serba terbatas. Program kerja KKSS Pusat dalam bidang budaya meliputi sebagai berikut :

1. Mendirikan sanggar seni budaya Sulawesi Selatan dan memproduksi berbagai karya seni budaya, dengan video kaset dan buku.
2. Menyusun buku petunjuk pemakaian berbagai macam pakaian daerah bersama atributnya dan menyediakan toko peralatan pakaian adat/budaya Sulawesi Selatan.

3. Melestarikan tata cara adat Sulawesi Selatan dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat melakukan upacara adat berupa khinatan, perkawinan, berduka cita, syukuran dan lain-lain.
4. Melaksanakan pekan budaya dan malam budaya serta misi budaya ke daerah dan ke luar negeri.
5. Melestarikan aksara Lontara dengan mengajarkan kepada generasi muda.
6. Mengupayakan penulisan buku-buku kebudayaan dan mendirikan perpustakaan budaya Sulawesi Selatan.
7. Memasyarakatkan budaya "siri" dalam arti yang positif, untuk meraih prestasi karena budaya "siri" (malu) dapat memacu untuk lebih maju dan ini sangat positif.

Sejalan dengan program kerja tersebut, pengurus paguyuban KKSS di Pontianak juga telah melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk lebih memasyarakatkan kesenian daerah Sulawesi Selatan, baik bagi para anggotanya maupun bagi masyarakat lain. Hal itu terwujud dalam bentuk pengelolaan kelompok-kelompok seni budaya yang anggotanya direkrut dari putra-putri warga yang masih berusia muda belia. Paguyuban menyediakan guru tari, tempat latihan, dan perangkat asesoris pendukung pementasan yang diperlukan. Kelompok tari-tarian ini senantiasa ditampilkan dalam acara-acara resmi, misalnya menyambut tamu atau anggota baru, melepas anggota yang pindah tugas, pelantikan pengurus, atau dalam acara-acara keagamaan misalnya Halal Bil Halal.

Dalam hal adat istiadat, para anggota juga diperkenalkan dengan adat istiadat dari Sulawesi Selatan. Banyak adat istiadat dari Sulawesi Selatan yang berkembang di Pontianak yang sudah tidak dimengerti oleh generasi muda. Mereka (para generasi muda) tidak tahu bahwa selama ini kebudayaan atau adat istiadat yang mereka lihat, ternyata berasal dari adat istiadat nenek moyang mereka. Misalnya, upacara Robo-robo yang ada di Pontianak sebenarnya berasal dari Sulawesi

Selatan. Hal ini tampak seperti apa yang dikemukakan informan di bawah ini :

Saya melihat adat yang ada di Sulawesi Selatan masih dilaksanakn di sini, misalnya ada kebiasaan dari sana buang-buang di air (misalnya pisang, sirih, kapur) atau melabuh sesajian, kalau di Yogyakarta ada labuhan di pantai Parangtritis. Manifestasi di sini dalam bentuk upacara Robo-robo. Itu murni dari Sulawesi Selatan. Sejarahnya adalah Sultan Mempawah atau biasa disebut Daeng Manambon, orang Sulawesi Selatan yang datang pada waktu itu. Adat itu masih tetap dilaksanakan sampai sekarang, tetapi banyak anak-anak baik perantau maupun yang lahir di Pontianak tidak tahu atau banyak yang tidak tahu bahwa adat tersebut berasal dari nenek moyang mereka di Sulawesi Selatan.

Banyaknya adat istiadat dari Sulawesi Selatan yang ada di Pontianak biasanya mengalami proses adaptasi budaya. Dengan adanya proses adaptasi tersebut kadang-kadang menimbulkan akibat terhadap kemurnian adat istiadat tersebut. Di sisi lain masyarakat Pontianak kadang-kadang juga mengklaim bahwa adat istiadat tersebut merupakan adat mereka (masyarakat Pontianak). Seperti tari-tarian yang ada di Pontianak yaitu tarian Matojang, masyarakat Pontianak menganggap bahwa itu adalah murni kebudayaannya. Meski demikian, sebenarnya bukan seperti itu sebagaimana dituturkan di bawah ini :

Dalam hal budaya, misalnya tarian Matojang pada saat festival budaya dilaksanakan di Cirebon ditampilkan kesenian Matojang. Padahal Matojang merupakan seni budaya asli Sulawesi Selatan, tetapi ditampilkan sebagai kesenian dari Melayu Pontianak. Sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan, Matojang merupakan kesenian yang menceritakan tentang kelahiran anak. Pada saat anak lahir lalu diletakkan di Tojang (ayunan), tetapi ada juga Matojang yang merupakan upacara setelah panen di Sulawesi Selatan dengan memakai pohon besar (lesung) untuk menumbuk padi, biasanya dilakukan dengan Mapadandang (berdandang) disertai dengan tarian.

D. Kehidupan Politik

Dalam kehidupan politik yang berhubungan dengan partai politik, paguyuban memang tidak mempunyai peranan apapun terhadap anggota-anggotanya. Para anggota bebas memilih atau masuk menjadi anggota Parpol atau Golkar. Sebagai suatu paguyuban yang sangat heterogen dilihat dari asal suku dan agamanya, KKSS memang tidak terlalu mencampuri kehidupan politik para anggotanya. Hal itu sesuai dengan apa yang dituturkan oleh informan berikut ini :

Sebagai paguyuban kedaerahan yang anggota-anggotanya mempunyai latar belakang suku, agama yang berbeda-beda, paguyuban memang tidak mencampuri kehidupan politik praktis mereka. Paguyuban menyerahkan sepenuhnya pilihan politik para anggota. Kami (pengurus paguyuban) hanya menekankan para anggota untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara ikut Pemilu. Untuk pilihan yang mana, kami menyerahkan sepenuhnya pada para anggota untuk memilih partai. Jadi kami tidak pernah mengarahkan para anggota untuk memilih suatu partai tertentu. Kalau kami sudah mengurus hal-hal tersebut, kami takut tujuan utama dari adanya paguyuban akan terabaikan.

Kalau di bidang politik praktis yang berhubungan dengan Parpol dan Golkar bisa dikatakan paguyuban tidak mempunyai peranan apapun bagi para anggotanya. Lain halnya dalam "lapangan politik" lain, dirasakan adanya peranan paguyuban terhadap para anggota yang membutuhkan dukungan atau surat rekomendasi dari paguyuban untuk menduduki jabatan tertentu. Baru-baru ini, paguyuban telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencalonan beberapa anggotanya untuk jabatan walikota. Surat tersebut merupakan aspirasi dari para anggota KKSS yang ada di Kalimantan Barat. Mengenai surat rekomendasi dan dukungan tersebut, salah seorang informan yang kebetulan menjadi pengurus paguyuban mengatakan seperti di bawah ini.

Memang kami akui pengurus KKSS Kalimantan Barat telah menerbitkan surat rekomendasi dan dukungan terhadap anggota yang dicalonkan menjadi walikota yaitu di Pontianak dan di Pare-pare Sulawesi Selatan. Saya pikir itu tidak bertentangan dengan tujuan organisasi, karena apa yang kami rekomendasikan memang begitulah adanya dan itu merupakan aspirasi dari para anggota KKSS. Misalnya, anggota kami yang dicalonkan menjadi walikota itu merupakan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Barat, dan saya pikir tidak ada salahnya menyampaikan aspirasi dan dukungan dari warga Sulawesi Selatan yang ada di Kalimantan Barat untuk pencalonan tersebut. Itu semua juga wujud hubungan kami dengan Pemda daerah asal (Sulawesi Selatan). Itu juga wujud tanggung jawab kami terhadap daerah asal kami

Dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh paguyuban dan dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, memang terlihat bahwa para anggota paguyuban sangat menghormati dan patuh kepada pemimpin atau tokoh yang dituakan. Ada fanatisme tersendiri dari para anggota terhadap tokoh-tokoh yang mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Dalam kehidupan selanjutnya, tidak jarang fanatisme dan dukungan yang tanpa "reserve" tersebut dibuat atau diformalkan untuk mendukung kepentingan tertentu dari pemimpin tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, contoh sederhananya bisa kita lihat dalam hal dukungan terhadap pencalonan untuk jabatan tertentu seperti telah disebutkan di atas.

BAB IV

PERANAN PAGUYUBAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITARNYA

Di kota-kota besar di Indonesia biasanya terdapat berbagai macam paguyuban etnis atau kedaerahan. Alasan-alasan fundamental pembentukan paguyuban-paguyuban tersebut pada umumnya karena keberadaannya dapat berfungsi secara efektif sebagai suatu mekanisme adaptif dalam menghadapi kehidupan di daerah perkotaan. Tidak jarang penduduk kota secara individu dapat memasuki atau menjadi anggota organisasi-organisasi lainnya untuk mensosialisasikan dirinya dalam sektor-sektor tertentu atau yang bersifat khusus, misalnya organisasi buruh, tukang, olah raga dan sebagainya. Namun demikian, keberadaan paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan ini tampaknya masih mempunyai tempat dalam struktur sosial kota.

Secara umum munculnya paguyuban-paguyuban di daerah perkotaan sebenarnya bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di samping itu, juga untuk mendapatkan rasa aman dan perasaan persaudaraan bagi para anggotanya yang berasal dari daerah yang sama tanpa memandang kekayaan, pendidikan maupun jabatan. Dengan demikian, ada kecenderungan bahwa keberadaan paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan di daerah perkotaan biasanya lebih mementingkan "diri sendiri", dan kurang tampak adanya upaya untuk membina hubungan yang lebih luas dan erat

dengan masyarakat sekitarnya dan paguyuban-paguyuban lainnya yang sejenis.

Sungguhpun demikian, bukannya tidak mungkin bahwa di daerah perkotaan kita jumpai adanya paguyuban yang memang memiliki hubungan yang cukup luas dengan masyarakat sekitarnya dan paguyuban-paguyuban sejenis lainnya. Hubungan ini sekaligus juga mencerminkan keaktifan dari paguyuban tersebut. Sebagai contohnya adalah keberadaan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kotamadya Pontianak yang dibicarakan dalam tulisan ini.

KKSS mempunyai semboyan “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yang artinya bahwa di mana kita (KKSS) berada disitulah kita membangun diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekitar kita dan membina hubungan dengan, masyarakat yang ada di sekitar kita.

Seorang informan kami yang berasal dari suku Bugis, yang kebetulan menjabat sebagai Ketua KKSS di Kotamadya Pontianak mengatakan bahwa selama ia menjabat sebagai ketua KKSS selama dua periode belum pernah terjadi konflik, baik antarwarga KKSS sendiri maupun antarwarga KKSS dengan masyarakat di sekitarnya. Jika terjadi konflik maka pertama-tama yang saya lakukan adalah melokalisir permasalahan agar jangan membawa-bawa nama suku atau kelompok melainkan nama pribadi. Selanjutnya, saya akan memberi pengarahan kepada warga saya dengan berbagai falsafah orang-orang tua, seperti misalnya ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan kejahatan orang terhadap dirimu. Apabila nasehat ini disampaikan dengan cara yang baik, saya kira dapat merupakan salah satu pengendali diri agar supaya jangan timbul konflik lebih lanjut.

Semboyan KKSS seperti tersebut di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak ternyata tidak hanya mementingkan “diri sendiri”, akan tetapi juga berusaha membina hubungan yang lebih luas dengan masyarakat di sekitarnya. Sampai sejauh mana KKSS melakukan hubungan dengan masyarakat disekitarnya akan diuraikan secara terperinci seperti di bawah ini.

A. Hubungan KKSS Dengan Paguyuban Lainnya

Sejalan dengan salah satu tujuan berdirinya BPP KKSS, yaitu untuk menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian warga Sulawesi Selatan, dimana saja, di wilayah Republik Indonesia sebagai insan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Untuk itu maka KKSS merasa bertanggung jawab untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional, dan menjaga serta mewaspadaai kemungkinan terjadinya isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka BPW KKSS yang berkedudukan di Kotamadya Pontianak tentunya juga merasa bertanggung jawab untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, stabilitas nasional, dan menjaga serta mewaspadaai kemungkinan terjadinya isu SARA di Kotamadya Pontianak. Oleh karena itu, KKSS selalu berusaha menjalin hubungan kerjasama atau mengadakan komunikasi aktif dan interaktif dengan paguyuban-paguyuban sejenis atau organisasi-organisasi sosial lainnya yang ada di kotamadya tersebut.

Ketika di beberapa tempat di Propinsi Kalimantan Barat dilanda kerusuhan antaretnik (suku Dayak dengan suku Madura), KKSS bersama paguyuban dan organisasi lainnya ikut aparat keamanan menanggulangnya. Keikutsertaan KKSS beserta organisasi lainnya diwujudkan dalam penanganan pasca kerusuhan dan proses penyusunan naskah pernyataan kebulatan tekad atas peristiwa yang terjadi. Kebulatan tekad ini telah mendorong dan melahirkan kesepakatan untuk menyelenggarakan upacara adat perdamaian di antara kedua suku yang bertikai. Paguyuban yang ikut serta dalam menangani peristiwa ini antara lain Majelis Dewan Adat Dayak (MDAD), Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBMI), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Hubungan kerjasama antara KKSS dengan paguyuban sejenis lainnya juga terlihat dari peran sertanya dalam

pertemuan antar kelompok yang diselenggarakan oleh Forum Aspirasi Pemuda Mahasiswa Dayak (FAPMD). Pertemuan ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dan sikap terhadap kondisi yang mengancam stabilitas daerah Kalimantan Barat.

Seorang informan yang mewakili KKSS dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pertemuan ini dihadiri oleh semua tokoh dari berbagai suku bangsa yang ada di Kotamadya Pontianak. Mulai dari pemuka suku Dayak, Madura, Melayu, Minang, Jawa, Sunda, dan bahkan juga dihadiri pemuka keturunan Cina. Dalam pertemuan ini para mahasiswa kebetulan membicarakan masalah etnis Cina yang dianggap kurang dapat membaaur dengan penduduk pribumi. Kemudian ada peserta pertemuan yang memberi tanggapan bahwa hal ini karena etnis Cina dalam bermasyarakat cenderung mengandalkan kemampuan ekonomisnya. Salah satu contohnya jika di kampung diadakan siskamling, maka orang Cina biasanya lebih suka menggantinya dengan uang atau dengan membayar orang untuk mewakilinya. Mungkin orang pribumi pun juga mampu membayar orang untuk menggantikan siskamling, tetapi hal ini jarang sekali dilakukan karena takut dianggap tidak bermasyarakat. Tanggapan ini dibantah oleh peserta pertemuan dari etnis Cina dengan mengatakan bahwa tidak semua orang Cina bersikap demikian. Buktinya di lingkungan tempat tinggal saya banyak orang Cina yang terlibat langsung dalam siskamling.

Pemasalahan lainnya yang dilontarkan oleh paran mahasiswa adalah mengenai penerimaan pegawai di perusahaan milik orang Cina yang dianggap ada diskriminasi. Namun menurut peserta pertemuan dari etnis Cina mengatakan bahwa sesungguhnya yang terjadi bukan diskriminasi, karena perusahaan itu umumnya perusahaan milik keluarga. Sehingga wajar apabila lebih mementingkan keluarga.

Selain aktif mengakhiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh paguyuban sejenis, apabila KKSS ada kegiatan biasanya juga memandang paguyuban-paguyuban lain yang ada di Kotamadya Pontianak. Pada saat KKSS mengadakan kegiatan untuk memperingati Peristiwa Korban

40.000 jiwa di Sulawesi Selatan misalnya, kegiatan ini biasanya juga dimeriahkan dengan pertandingan olah raga. Untuk memeriahkan pertandingan olah raga ini KKSS biasanya juga mengundang paguyuban-paguyuban sejenis lainnya, seperti IKBM, S. Opat dan FAPMD untuk ikut serta berpartisipasi olah raga ini secara tidak langsung sebenarnya telah mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar sesama penduduk Kotamadya Pontianak yang multi etnik.

Hubungan KKSS dengan paguyuban sejenis lainnya juga terlihat dengan adanya permohonan berisi permintaan tolong untuk mendapatkan jatah Operasi Pasar dari DOLOG.

Menurut penjelasan seorang informan kami, adanya permintaan ini barangkali karena Paguyuban S. Opat tahu bahwa pernah mengajukan permintaan kepada Kadolog untuk mendapatkan jatah beras Operasi Pasar, dan berhasil tanpa proses yang berbelit-belit. Namun keberhasilan ini bukannya tanpa pengorbanan. Karena setelah kita mengajukan surat permohonan kepada Kadolog, selama surat itu diproses kita harus mengikuti terus dan tidak segan-segan untuk menanyakannya. Jika tidak diikuti besar kemungkinan surat itu bisa hilang karena pihak DOLOG tidak hanya melayani satu orang melainkan banyak orang. Jadi selama surat permohonan yang kita ajukan itu diproses, kita harus selalu mengikutinya. Inilah yang kami maksud dengan pengorbanan, terutama pengorbanan masalah waktu. Dengan adanya permintaan tolong dari rekan-rekan S. Opat tersebut pada dasarnya tidak kami tolak, tetapi kami harus mencari waktu senggang untuk melaksanakannya.

Sejalan dengan program kerja hasil Musyawarah Besar (MUBES) V KKSS yang diselenggarakan pada tahun 1995 di Jakarta, yang satu di antaranya adalah menghendaki agar di tiap-tiap propinsi dan kabupaten dapat dibentuk lembaga koperasi. Sehubungan dengan hal ini, maka KKSS telah dua kali mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi. Dalam rapat ini, KKSS telah mengundang Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kotamadya Pontianak untuk menyaksikan pembentukan koperasi yang akan dibentuk oleh

BPW KKSS. Hal ini berarti bahwa KKSS juga telah menjalin hubungan dengan organisasi lainnya yang ada di Kotamadya Pontianak.

Sungguhpun demikian, koperasi yang dibentuk oleh BPW KKSS ini sampai sekarang belum berjalan, kecuali kegiatan simpan-pinjamnya. Menurut seorang informan hal ini karena tenaga pengurusnya belum ada. Adapun koperasi yang sudah berjalan dan berbadan hukum justru koperasi yang didirikan oleh BPC KKSS Kabupaten Dati II Sintang. Koperasi ini diberi nama Koperasi Serba Usaha.

Di Propinsi Kalimantan Barat sebenarnya juga terdapat paguyuban yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu Kerukunan Keluarga ENTALU (Enrekang, Toraa, Luwu). Paguyuban ini berdirinya sudah sejak lama dan telah melembaga di kalangan para anggotanya melalui aktifitas arisan-arisan keluarga serta kepedulian sosial antarwarga paguyuban tersebut. Seorang informan kami dari suku Toraja mengatakan bahwa keberadaan Kerukunan Keluarga ENTALU merupakan pilar utama dari KKSS. Selanjutnya, ia memberi penjelasan sebagai berikut.

Sebelum menjadi anggota KKSS, saya sudah aktif di kepengurusan Kerukunan Keluarga ENTALU sebagai sekertaris. Saya menjadi anggota KKSS sekitar tahun 80-an. Mula-mula saya hanya sebagai anggota biasa tetapi setelah periode II kepemimpinan Bapak Kadir Ubbe, saya diangkat menjadi pengurus di bidang kerohanian. Di paguyuban ini saya merasa lebih banyak lagi bertemu dengan saudara-saudara yang berasal dari satu daerah di perantauan. Karena semua anggota Kerukunan Keluarga ENTALU secara otomatis adalah anggota KKSS, sedangkan setiap anggota KKSS belum tentu menjadi anggota Kerukunan Keluarga ENTALU.

Di samping Kerukunan Keluarga ENTALU, di Propinsi Kalimantan Barat juga masih ada organisasi otonom yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu IKAMI (Ikatan Mahasiswa) Sulawesi Selatan Cabang Persiapan Pontianak. Hubungan di antara keduanya ialah KKSS memberi dukungan moril dan

materiil terhadap pengembangan IKAMI Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari kepedulian KKSS dalam memberi dorongan terhadap organisasi tersebut. Misalnya ketika PB IKAMI Pusat mengadakan acara Temu Kaji Kewirausahaan di Jakarta. Dalam hal ini, KKSS telah mengikutsertakan utusan IKAMI Sulawesi Selatan untuk menghadiri acara tersebut. Pengembangan IKAMI Sulawesi Selatan Cabang Persiapan Pontianak ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber potensi kader bangsa.

B. Hubungan KKSS Dengan Masyarakat Lokal

Sebelum dibicarakan hubungan KKSS dengan masyarakat lokal, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan masyarakat lokal dalam subbab ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa masyarakat di Kotamadya Pontianak terdiri dari berbagai golongan sukubangsa. Sungguhpun demikian, pada dasarnya mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat lokal dalam tulisan ini adalah penduduk Kalimantan Barat, baik yang berstatus sebagai penduduk asli maupun penduduk pendatang, utamanya yang berdomisili di Kotamadya Pontianak.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud hubungan KKSS dengan masyarakat lokal dalam tulisan ini adalah hubungan KKSS dengan penduduk Kalimantan Barat, utamanya yang berdomisili di Kotamadya Pontianak. Hubungan ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban tersebut. Sebagai contohnya adalah kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh KKSS di Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak (Gambar 3).

Kegiatan tersebut di atas pada dasarnya merupakan perwujudan dari kepedulian KKSS dalam menghadapi terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan, sehingga daya beli masyarakat semakin merosot. Sementara itu harga-harga

berbagai kebutuhan hidup, utamanya sembilan bahan pokok (sembako) semakin hari semakin meningkat. Sehubungan dengan hal ini, maka KKSS telah mengajukan permohonan kepada Kadolog untuk menjadi penyalur beras dengan harga murah, sesuai dengan harga ketetapan pemerintah. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada para anggota KKSS, tetapi juga masyarakat umum yang kurang mampu, sebagaimana dikemukakan oleh informan di bawah ini.

Penjualan beras dengan harga murah ini tidak hanya untuk warga KKSS yang kurang mampu, tetapi juga untuk masyarakat umum yang kurang mampu. Ketika kegiatan ini kami laksanakan, para pembelinya ada orang Cina, ada orang Dayak, ada orang Melayu, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan program kerja Badan Pengurus Pusat (BPP), yaitu bahwa KKSS hendaknya dapat menjadi pelopor dalam rangka memperkokoh kesetiakawanan sosial dalam bentuk yang konkrit melalui penjualan beras tersebut. Selain beras, kami (KKSS) juga merencanakan akan melakukan operasi pasar dengan menjual minyak goreng dan gula pasir dengan harga murah.

Selain kegiatan operasi pasar dengan jalan menjual beras dengan harga murah kepada masyarakat sekitarnya juga terlihat dari dana bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang terancam putus sekolah. Sehubungan dengan hal ini, maka KKSS telah memberi bantuan kepada mereka melalui Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (Lembaga GN-OTA) setempat, sebagaimana pernyataan seorang informan dibawah ini.

KKSS memberi santunan untuk anak-anak yang terancam putus sekolah pada dasarnya untuk masyarakat umum. Santunan ini kami (KKSS) salurkan melalui GN-OTA Kotamadya Pontianak. Besarnya santunan tergantung dari hasil sumbangan setiap warga KKSS yang dihimpun secara spontan pada saat KKSS menyelenggarakan suatu acara tertentu, seperti acara halal bihalal. Acara ini biasanya dihadiri oleh seluruh anggota KKSS. Pada saat itulah setiap anggota KKSS mengumpulkan uang secara sukarela untuk membantu anak-anak asuh yang terancam putus sekolah.

Pada tanggal 11 Desember 1946 di daerah Sulawesi Selatan pernah terjadi peristiwa bersejarah yang tidak mudah dilupakan oleh bangsa Indonesia, yaitu peristiwa pembantaian secara besar-besaran yang dilakukan oleh Kapten Westerling terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa kurang lebih 40.000 orang. Sehubungan dengan itu setiap bulan Desember warga KKSS Kotamadya Pontianak selalu mengadakan kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengenang peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan.

Selain ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kegiatan untuk mengenang korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan ini biasanya juga disemarakkan dengan berbagai kegiatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya, seperti kegiatan aksi sosial kemasyarakatan dan olah raga. Hal ini terlihat dari penuturan seorang informan di bawah ini.

Dalam rangka mengenang peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan pada tahun 1997, KKSS telah mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kotamadya Pontianak. Ziarah ini dihadiri oleh Dandim Pontianak dan unsur Muspida lainnya. Di samping itu, KKSS juga melakukan berbagai aksi-sosial kemasyarakatan dan olah raga, seperti donor darah, aksi kebersihan yang dilakukan di pasar Dahlia dan olah raga sepak takraw. Sebenarnya, KKSS juga merencanakan mengadakan sunatan massal. Namun demikian, karena situasi dan kondisi sekarang masih belum memungkinkan maka pelaksanaan kegiatan ini terpaksa kami tunda untuk tahun yang akan datang.

Sementara itu kegiatan olah raga sepak takraw tampaknya telah menjadi salah satu kalender kegiatan tahunan olah raga Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Kalimantan Barat. Hal ini terlihat dari adanya kejuaraan sepak takraw se-Kalimantan Barat untuk memperebutkan piala bergilir Ketua BPW KKSS Kalimantan Barat. Kegiatan ini untuk pertama kami diselenggarakan pada bulan Desember 1996, dan merupakan bagian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)

KKSS. Menurut penjelasan seorang informan, bahwa dilaksanakannya kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul dalam olah raga sepak takraw yang kelak dapat berprestasi mengangkat nama daerah Kalimantan Barat ke tingkat nasional.

C. Hubungan KKSS Dengan Pemerintahan Daerah Setempat

Dalam pokok-pokok penjabaran pelaksanaan program kerja BPW KKSS dikemukakan mengenai adanya pembinaan hubungan keluar dan kemitraan dengan masyarakat luas maupun aparat Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun kekokohan persepsi yang positif terhadap keberadaan KKSS, baik di mata masyarakat luas maupun Pemerintah Daerah setempat.

Berbagai kegiatan KKSS, baik yang menyangkut hubungan KKSS dengan paguyuban lainnya serta hubungan KKSS dengan masyarakat lokal seperti yang telah dibicarakan di atas, pada dasarnya merupakan implementasi program kerja KKSS dalam rangka melakukan pembinaan hubungan keluar dan kemitraan dengan masyarakat luas. Kegiatan KKSS yang menyangkut pembinaan hubungan keluar dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah setempat implementasinya terlihat dari keterlibatan KKSS dalam berperan serta menangani berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya, peran serta KKSS dalam menangani masalah kerusuhan yang terjadi di Propinsi Kalimantan Barat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Propinsi Kalimantan Barat pernah dilanda kerusuhan antaretnik antara suku Dayak dengan suku Madura. Kerusuhan yang terjadi pada awal tahun 1997 ini telah menyebabkan suasana di Kotamadya Pontianak sangat mencekam. Oleh karenanya, keamanan setempat terpaksa harus memberlakukan jam malam bagi warga masyarakat kotamadya tersebut. Sehubungan dengan hal ini KKSS telah ikut berperan serta membantu aparat keamanan dan Pemerintah Daerah setempat menangani kerusuhan tersebut. Peran serta KKSS yakni adalah menyusun

pernyataan bersama/kebulatan tekad dan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang terjadi. Peran serta KKSS ini sebenarnya merupakan upaya untuk menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Daerah setempat. Dengan demikian di mata Pemerintah Daerah setempat, keberadaan KKSS dapat dipandang sebagai mitra kerja dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan masalah persatuan dan kesatuan warga masyarakat Kalimantan Barat, utamanya di Kotamadya Pontianak.

Sementara itu KKSS juga telah menjalin hubungan kemitraan dengan Kapolres Sambas, sehubungan dengan terjadinya keributan di Hotel dan Restoran Sankubana. Keributan ini telah mengakibatkan cideranya seorang anggota pengurus BPC KKSS Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, KKSS merasa berkepentingan untuk turut serta menangani permasalahan itu dengan cara berkirim surat kepada Bapak Kapolres beserta jajarannya. Isi surat berisi himbauan agar masalah tersebut diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di bidang pendidikan, KKSS juga telah menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi permasalahan yang erat kaitannya dengan masalah dana pendidikan bagi anak asuh yang ada di Kotamadya Pontianak. Hal ini terlihat dari adanya sumbangan dan pendidikan dari KKSS untuk anak asuh yang terancam putus sekolah. Sumbangan tersebut disalurkan melalui Pengurus Daerah Lembaga GN-OTA Kotamadya Pontianak. Dengan demikian, maka keberadaan KKSS ternyata juga telah menjadi mitra kerja bagi Pemerintah Daerah setempat dalam mengatasi kekurangan dana pendidikan bagi anak asuh yang terancam putus sekolah.

Hubungan kemitraan antara KKSS dengan Pemerintah Daerah setempat juga terlihat dari adanya beberapa pengurus paguyuban tersebut yang ikut menjadi anggota kelompok reformasi. Kelompok ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat bersama-sama dengan Lembaga Swadaya

Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Kotamadya Pontianak.

Seperti apa yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu bahwa dalam hal kehidupan sosial keagamaan, KKSS memberi kesempatan dan mendukung para anggotanya menyelenggarakan acara-acara atau perayaan keagamaan, seperti halal bilhalal dan perayaan Natal bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan silaturahmi antar sesama anggota KKSS. Dalam pelaksanaannya, perayaan keagamaan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Daerah setempat. Dengan demikian selain untuk menjalin hubungan silaturahmi antar sesama anggota KKSS, perayaan keagamaan ini sebenarnya juga dimaksudkan untuk menjalin hubungan silaturahmi antara KKSS dengan tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat.

Secara politis, keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak sebenarnya juga mempunyai hubungan kemitraan dengan Pemerintah Daerah setempat. Hal ini terlihat ketika Pemerintah Daerah Kotamadya Pontianak mengadakan pemilihan Walikota masa bakti 1998 sampai dengan 2003. Sehubungan dengan ini KKSS telah mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Pontianak. Isi surat berupa pernyataan memberi dukungan sepenuhnya dan sekaligus memberi rekomendasi terhadap seorang tokoh masyarakat yang dicalonkan.

D. Hubungan KKSS Dengan Pemerintahan Daerah Asal

Keberadaan paguyuban-paguyuban kedaerahan di daerah perantauan seringkali dapat memberi manfaat bagi Pemerintah daerah asal para anggota paguyuban. Hal ini karena paguyuban-paguyuban tersebut pada umumnya dapat menjadi pendukung yang kuat bagi orang-orang sedaerah untuk tetap dapat bertahan hidup di daerah perantauan. Oleh karena itu, keberadaan paguyuban-paguyuban di daerah perantauan biasanya mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah asal para anggotanya. Dukungan ini terlihat dari adanya hubungan

antara paguyuban-paguyuban itu dengan Pemerintah Daerah asal. Tidak terkecuali dengan keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak.

Hubungan KKSS dengan Pemerintah Daerah asal ini terlihat dari adanya jalinan silaturahmi antara KKSS dengan rombongan DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Hubungan ini tampak pada waktu rombongan DPRD melakukan kunjungan kerja di Propinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan di bawah ini.

“Apabila ada rombongan dari DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan yang melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, ya kita (KKSS) terima sebagai tamu atau saudara kita. Mereka seringkali menyampaikan permintaan untuk dibuatkan suatu acara khusus untuk silaturahmi. Acara ini sangat berguna bagi semuanya. Mereka yang dari daerah dapat memberikan informasi mengenai keadaan di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, kami yang berada di Kalimantan Barat dapat menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkembang pada masyarakat Sulawesi Selatan di Kalimantan Barat, sekiranya hal ini diperlukan.

Selain menyambut rombongan DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, KKSS juga pernah menyambut rombongan para Kepala Itwilkab (Inspektorat Wilayah Kabupaten) dari 21 kabupaten dan 2 kotamadya se Propinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, KKSS juga menyambut rombongan Ulama Besar Propinsi Sulawesi Selatan yang melakukan kunjungan ke Propinsi Kalimantan Barat.

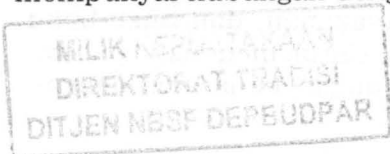
Berbagai kegiatan yang dilakukan KKSS Kotamadya Pontianak tentunya memerlukan adanya dukungan dana. Satu di antara beberapa upaya KKSS untuk menghimpun dana tersebut adalah dengan menjual berbagai hasil produksi masyarakat Sulawesi Selatan, seperti cinderamata, pakaian adat, kaset-kaset, lukisan-lukisan, makanan, dan buku-buku budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Untuk mendukung upaya tersebut, KKSS telah menjalin hubungan kerjasama dengan

daerah asalnya (Ujung Pandang) untuk menjadi penyuplai barang-barang tersebut. Dengan adanya kerjasama ini, maka secara tidak langsung KKSS juga telah memperkenalkan potensi daerah asalnya di daerah perantauan.

Hubungan KKSS dengan Pemerintah Daerah Asal juga terlihat dari sumbangan pemikirannya terhadap program pembangunan yang berlangsung di daerah asalnya. Hal ini terlihat dari penjelasan yang diberikan oleh informan kami di bawah ini.

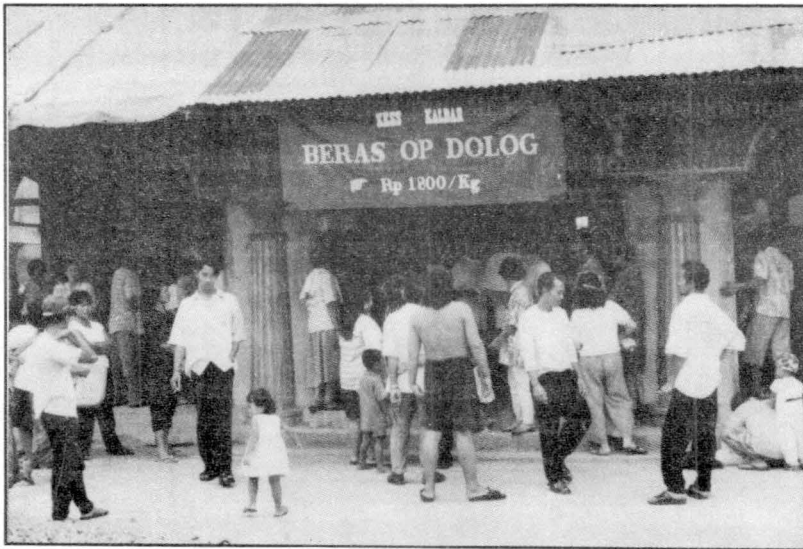
“Idealnya, sebuah paguyuban kedaerahan itu memang harus memberikan sumbangan untuk membantu pembangunan di daerah asalnya. Namun sumbangan itu kan tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga dalam bentuk konsep-konsep pembangunan. Misalnya, mengenai pemikiran-pemikiran masyarakat Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan masalah pembangunan di daerah perantauan, pemikiran-pemikiran ini seringkali diminta agar supaya disampaikan kepada Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Sehingga keterkaitan kita dengan Pemerintah Daerah asal, apabila ada legislatif dan eksekutif dari Sulawesi Selatan ke daerah di luar Sulawesi Selatan, pertama-tama yang dicari biasanya KKSS. Jadi, hubungan antara KKSS dengan Pemerintah Daerah asal itu cukup erat”.

Sejalan dengan diadakannya pemilihan wali kotamadya Pare-Pare, Propinsi Sulawesi Selatan masa bakti 1998 sampai dengan 2003, maka KKSS telah mengirim surat kepada Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Pare-Pare. Surat tersebut berisi dukungan sepenuhnya dan sekaligus rekomendasi dari Keluarga Besar Sulawesi Selatan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat terhadap seorang tokoh masyarakat yang dicalonkan sebagai wali kotamadya tersebut. Hal ini berarti bahwa keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak secara politis masih mempunyai hubungan dengan Pemerintah Daerah asal.





Rumah dinas Ketua KKSS yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat KKSS



Gambar 3. Satu di antara beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KKSS terhadap masyarakat sekitar adalah penyaluran beras OP di kelurahan Parit Tokaya pada tanggal 8 Agustus 1998

BAB V

ANALISIS

Kaum imigran yang hidup di kota-kota besar senantiasa akan menghadapi lingkungan sosial yang heterogen, terspesialisasi, dan terdiferensiasi secara tajam. Keadaan ini seringkali menimbulkan masalah dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat urban. Oleh karena itu, mereka secara institusional dan rasional perlu menentukan berbagai ketentuan dan aturan untuk mengatur tata kehidupan, tingkahlaku, dan inter-relasi dalam kehidupan sosial di daerah perkotaan.

Menurut S. Menno dan Mustamin Alwi (1992), bahwa timbulnya masalah yang dihadapi oleh kaum imigran tersebut lebih banyak disebabkan oleh karena urbanisasi yang terjadi lebih bertitik berat pada urbanisasi fisik, yang artinya bahwa gerak perpindahan kaum imigran tersebut hanya secara fisik dari daerah asal ke lingkungan perkotaan. Sementara itu urbanisasi mental sangat kecil sehingga kemampuan menyesuaikan dengan kehidupan urban juga sangat kecil. Adapun urbanisasi mental yang dimaksud di sini gerak peralihan atau transformasi dan perubahan aspek sosio-psikologis, utamanya pola berfikir dan bertindak, yakni dari pola berfikir dan bertindak rural ke pola berfikir, bersikap, dan bertindak urban.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka urbanisasi mental menuntut adanya kemampuan gerak yang dengan segera dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan tuntutan aspek sosio-psikologis dalam suatu lingkungan perkotaan. Satu di antara berbagai jalan keluar yang ditempuh kaum imigran untuk mengatasi kekurangan kemampuan urbanisasi mental ini adalah dengan mendirikan paguyuban-paguyuban yang bersifat kedaerahan.

Bagi kaum imigran, keberadaan paguyuban-paguyuban yang bersifat kedaerahan ini dapat dipandang sebagai suatu mekanisme adaptif yang cukup efektif untuk menghadapi kehidupan di daerah perkotaan. Karena selain dapat memberi dorongan aspek sosio-psikologis, setiap anggota paguyuban merasa sebagai saudara se daerah tanpa membedakan kekayaan dan pendidikan.

Menurut pendapat Oscar Lewis yang disitir oleh S. Menno dan Mustamin Alwi, ada dua alasan mengapa sistem kekerabatan fiktif (paguyuban Kedaerahan) masih tetap ada di daerah perkotaan. Pertama, di dalam masyarakat kota, industrialisasi belum berperan sepenuhnya. Hal ini menyebabkan fungsi-fungsi yang penting dari organisasi kekerabatan masih berjalan terus. Kedua, masyarakat industri belum dapat memenuhi organisasi sosialnya sendiri. Untuk itu dalam berbagai situasi sosial, misalnya dalam usaha untuk memperoleh pekerjaan atau jaminan hukum dan fasilitas-fasilitas lainnya, maka keberadaan paguyuban kedaerahan di daerah perkotaan dapat berfungsi sebagai penolong.

Masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai sukubangsa, dengan latar kebudayaan dan agama yang bervariasi yang ada di daerah perantauan tampaknya juga tidak terlepas dari adanya ikatan-ikatan kedaerahan. Hal ini terlihat dari keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak. Meskipun di kotamadya tersebut terdapat berbagai organisasi modern, dalam arti adanya diferensiasi dan spesialisasi yang dapat menyalurkan kepentingan dan keinginan para anggotanya,

tetapi keberadaan KKSS masih tetap mempunyai peranan penting dalam mengendalikan dan mempengaruhi tingkahlaku serta tindakan anggota-anggotanya. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam sub bab ini menganalisis mengenai kekuatan-kekuatan apa yang dapat mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di daerah perantauan mengintegrasikan diri ke dalam suatu wadah organisasi yakni paguyuban KKSS. Adapun kekuatan-kekuatan tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu kekuatan sentripetal dan kekuatan sentrifugal.

A. Kekuatan Sentripetal

Munculnya paguyuban yang bersifat kedaerahan di daerah perkotaan pada dasarnya dilandasi oleh adanya kekuatan sentripetal, yaitu faktor-faktor yang mendorong integrasi antarsesama anggotanya, sehingga secara sukarela mereka bersedia menjadi anggota paguyuban tersebut. Demikian pula halnya dengan keberadaan KKSS yang didirikan oleh masyarakat Sulawesi Selatan di Kotamadya Pontianak. Munculnya paguyuban ini di kotamadya tersebut tentunya juga dilandasi oleh adanya faktor-faktor yang mendorong integrasi, baik antarsesama anggota KKSS maupun antara anggota KKSS dengan masyarakat sekitar.

Seperti apa yang telah dikemukakan di atas bahwa masyarakat Sulawesi Selatan terdiri dari berbagai kelompok sukubangsa, di antaranya Bugis, Makasar, Toraja, dan Mandar. Di daerah perantauan, keempat sukubangsa tersebut merasa berasal dari satu daerah asal. Sementara itu apabila dilihat dari sudut budaya mereka, kebudayaan keempat sukubangsa ini pada dasarnya tidak jauh berbeda (Matullada, 1991). Adanya perasaan sama-sama berasal dari satu daerah asal yang didukung oleh kemiripan kebudayaan, mereka tampaknya telah menjadi salah satu faktor yang mendorong integrasi masyarakat Sulawesi Selatan di Kotamadya Pontianak ke dalam suatu wadah paguyuban, yakni KKSS.

Masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya sukubangsa Bugis dan sukubangsa Makasar dikenal sebagai pelaut yang telah mengembangkan kebudayaan maritim sejak beberapa abad yang lalu. Dengan perahu-perahu layar dari tipe pinisi dan lambo, mereka telah mengarungi wilayah nusantara, bahkan sampai ke manca negara untuk berdagang (Matullada, 1990). Dengan demikian maka jiwa merantau pada masyarakat Sulawesi Selatan sebenarnya sudah tertanam sejak lama.

Menurut Yunus Melalatoa (1995) bahwa dengan adanya kebiasaan merantau ini maka jumlah sukubangsa Bugis dan Makasar di daerah asalnya menjadi semakin berkurang. Hal ini karena mereka tidak saja berdiam di daerah Sulawesi Selatan, tetapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu yang merantau di daerah perkotaan, masyarakat Sulawesi Selatan dihadapkan pada kehidupan urban yang serba heterogen, baik dalam tata kelakuan, adat-istiadat, jenis pekerjaan, status sosial, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, E. M. Bruner (1961) yang melakukan studi mengenai hubungan kekeluargaan dari sukubangsa Batak Toba di kota Medan menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan di antara mereka itu sangat kuat serta mempunyai fungsi dan arti yang penting dalam kehidupan mereka. Orang Batak Toba tidak terintegrasi secara penuh dengan masyarakat kota Medan dan tidak berasimilasi secara penuh dengan budaya kota. Keanekaragaman budaya di kota Medan dan kepentingan ekonomi serta politik orang Batak Toba ternyata telah memperkuat kesadaran akan identitas kesukuan mereka.

Adapun keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak pada dasarnya juga untuk memperkuat kesadaran akan identitas daerah asal para anggotanya dalam menghadapi kehidupan di kota Pontianak yang serba heterogen. Hal ini terlihat dari tujuan didirikannya paguyuban tersebut, yang satu di antaranya adalah untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan. Dengan demikian kesadaran akan identitas daerah asal ini dapat dipandang

sebagai salah satu faktor yang mendorong integrasi antarsesama anggota KKSS.

Faktor lainnya yang mendorong masyarakat Sulawesi Selatan di Kotamadya Pontianak mengintegrasikan diri ke dalam suatu wadah paguyuban KKSS adalah untuk memenuhi kebutuhan rasa aman di daerah perantauan. Dengan menjadi anggota KKSS, maka seorang penduduk Sulawesi Selatan yang melakukan migrasi ke Kotamadya Pontianak merasa bahwa di daerah perantauan ia tidak sendirian. Dengan demikian, antarsesama anggota KKSS dapat saling membantu dan melindungi ancaman dari pihak luar. Hal ini sesuai dengan pendapat Little (1965), yang mengatakan bahwa alasan utama mengapa kaum migran di daerah perkotaan masih mempertahankan identitasnya, yaitu untuk saling membantu perkembangan dan melindungi ancaman dari pihak luar. Dengan kata lain bahwa upaya mempertahankan identitas kaum urban ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rasa aman di daerah perkotaan.

Masyarakat Sulawesi Selatan yang merantau di daerah Kalimantan Barat, utamanya di Kotamadya Pontianak, seringkali merasa rindu dengan kampung halamannya. Menurut beberapa informan bahwa perasaan rindu dengan kampung halamannya ini dapat mereka atasi dengan cara menjadi anggota KKSS. Hal ini karena sebagai seorang perantau mereka merasa menemukan suatu ketenangan batin apabila dapat berkumpul dengan saudara-saudara lainnya dari Sulawesi Selatan. Suasana kekeluargaan yang terjalin antarsesama anggota KKSS ini mereka rasakan seolah-olah seperti berada di kampung halamannya sendiri. Dengan demikian, perasaan rindu terhadap kampung halamannya ini juga dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong integrasi antarsesama anggota KKSS.

Masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai kebiasaan berdebat untuk mendapatkan suatu kebenaran. Hal ini terlihat dari adanya pepatah yang mengatakan "Narekko melokko pettui bicara, Pasisaungngi bicarae naompo tongengnge", yang

artinya bahwa kalau kita mengambil suatu keputusan harus diperdebatkan/didiskusikan dahulu, sehingga mendapatkan suatu kebenaran yang disepakati bersama. Keberadaan KKSS di kotamadya Pontianak tampaknya juga telah mereka manfaatkan untuk menyalurkan kebiasaan berdebat, seperti terlihat dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh paguyuban tersebut. Oleh karena itu, kebiasaan melakukan perdebatan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang disepakati bersama ini juga dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong integrasi antaranggota KKSS.

Dalam berbagai situasi sosial, seperti dalam peristiwa kematian, keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak manfaatnya sangat dirasakan oleh para anggota paguyuban tersebut. Menurut hasil survai latihan yang dilakukan oleh para mahasiswa di Ujung Pandang menunjukkan bahwa peristiwa kematian dan sakit mempunyai fungsi sosial, yaitu dapat memulihkan dan menyegarkan kembali hubungan-hubungan keluarga dan kekerabatan, terutama yang telah renggang (S. Menno dan M. Alwi, 1992). Hal ini berarti bahwa peristiwa kematian dan sakit semata-mata bukan merupakan peristiwa individu melainkan peristiwa keluarga atau kerabat yang perlu ditanggulangi bersama.

Dalam kaitannya dengan peristiwa kematian yang menimpa seorang warga KKSS, paguyuban ini telah menetapkan suatu kebijakan yang berupa santunan kepada anggota KKSS yang terkena musibah. Santunan ini besarnya sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Di samping itu, para anggota KKSS yang lain biasanya akan meluangkan waktunya untuk datang melayat dan ikut membantu mengerjakan apa saja sesuai dengan kemampuan untuk meringankan beban keluarga yang mendapat musibah kematian.

Para anggota KKSS yang datang melayat tersebut pada dasarnya tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Bilamana sekali waktu ada di antara anggota KKSS lainnya mengalami peristiwa yang sama, maka akan dibalas lagi oleh anggota KKSS yang mendapat musibah kematian pertama. Oleh karena

itu, peristiwa ini juga dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang mendorong integrasi antar sesama anggota KKSS.

Para pendatang dari Sulawesi Selatan yang tinggal menetap di Kalimantan Barat pada umumnya dan Kotamadya Pontianak pada khususnya sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Oleh karenanya, banyak di antara mereka yang telah menurunkan sampai beberapa keturunan. Walaupun mereka lahir dan dibesarkan di Kotamadya Pontianak, namun keturunan para pendatang ini pada dasarnya masih merasa bahwa dirinya orang Sulawesi Selatan. Mengingat mereka lahir dan dibesarkan di daerah perantauan, maka pada umumnya mereka kurang mengenal dengan adat-isitiadat daerah asal orang tuanya. Salah satu diantara berbagai cara yang ditempuh keturunan para pendatang untuk lebih mengenal adat-istiadat daerah asal orang tuanya adalah dengan menjadi anggota KKSS. Hal ini berarti bahwa adanya orang tuanya juga dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang mendorong integrasi antar sesama anggota KKSS.

Adapun mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong integrasi antara anggota KKSS dengan masyarakat sekitar terlihat dari adanya semboyan “di mana bumi di pijak, di situ langit di junjung”. Artinya, dimana warga KKSS berada, akan tetap merasa di kampung halamannya, tanah tumpah darahnya, tanpa perbedaan di seluruh pelosok tanah air. Semboyan ini pada dasarnya merupakan cerminan bahwa warga KKSS senantiasa akan mengintegrasikan diri dengan masyarakat sekitar di daerah di mana ia berada. Wujud dari integrasi itu seperti untuk menyatukan potensi, membantu pemerintah dan kontribusi pada pembangunan daerah berupa swadaya masyarakat.

Faktor lainnya yang mendorong integrasi antara anggota KKSS dengan warga masyarakat sekitar juga terlihat dari pokok-pokok penjabaran pelaksanaan program kerja KKSS. Penjabaran program berupa pembinaan yang dimaksudkan untuk membangun kekokohan image positif tentang keberadaan KKSS, baik di mata masyarakat luas maupun aparat Pemerintah Daerah dimana KKSS itu berada.

Adapun implemenentasinya dilakukan dalam bentuk komunikasi aktif dan interaktif, baik secara formal maupun informal dengan semangat “silaturahmi” terhadap Pemerintah Daerah setempat beserta segenap jajaran Muspidanya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi sosial/kekerabatan masyarakat yang ada sampai ke lapisan masyarakat luas. Dengan demikian maka adanya semangat “silaturahmi” tersebut juga dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong integrasi antara anggota KKSS dengan masyarakat sekitar.

B. Kekuatan Sentrifugal

Sejak berdirinya KKSS di Kotamadya Pontianak sampai dengan perkembangannya yang sekarang ini pada dasarnya telah menunjukkan adanya gejala yang positif. Dalam arti, bahwa keberadaan paguyuban di kotamadya tersebut dapat menjadi wadah yang mengintegrasikan baik antar sesama anggota KKSS maupun anggota KKSS dengan masyarakat sekitar. Hal ini karena didukung oleh adanya kekuatan sentripetal sebagaimana yang diuraikan di atas.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka selain adanya kekuatan sentripetal yang mampu mendorong integrasi, kiranya perlu dikaji pula adanya kekuatan sentrifugal, yaitu faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi antara KKSS dengan masyarakat sekitar. Faktor-faktor ini biasanya bersumber pada masalah SARA. Hal ini tercermin dari penjelasan seorang informan dalam memberikan informasi mengenai hubungan KKSS dengan masyarakat sekitar. Informan tersebut mengatakan, “Kalau ada masalah dengan masyarakat sekitar, kami selalu mengarahkan untuk dilokalisir agar permasalahan tersebut menjadi hubungan pribadi, jangan sampai membawa-bawa suku. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan saja yang akan marah bila harga dirinya diinjak-injak. Kami kira semua suku apabila harga dirinya diinjak-injak pasti juga akan marah”.

Sampai sejauh ini keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak memang mampu menjalin hubungan yang cukup harmonis dengan masyarakat sekitar. Namun demikian, penjelasan informan tersebut di atas kiranya dapat dipandang sebagai faktor yang sewaktu-waktu dapat memicu timbulnya disintegrasi. Adapun yang menjadi persoalan di sini adalah persoalan-persoalan apa yang sekiranya dapat menimbulkan masyarakat Sulawesi Selatan (KKSS) di Kotamadya Pontianak merasa harga dirinya tersinggung.

Dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan sehari-hari, utamanya suku bangsa Bugis dan Makasar, masih banyak terikat oleh sistem norma dan aturan-aturan adatnya yang mereka anggap keramat dan sakral. Sistem norma tersebut adalah panngaderreng atau panngadakkang. Menurut Matullada (1990), sistem norma dan aturan-aturan adat ini terdiri dari lima unsur pokok, di antaranya : (1) Ade atau Ada, (2) Bicara, (3) Rapang, (4) Wari, dan (5) Sara. Kelima unsur pokok ini dalam alam pikiran suku bangsa Bugis dan suku bangsa Makasar terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis yang memberi rasa sentimen kewargaan masyarakat dan identitas sosial kepadanya, serta martabat dan harga diri yang semuanya terkandung dalam konsep Siri.

Keberadaan Siri dalam kehidupan masyarakat Bugis dan Makasar dipandang sebagai sebuah nilai budaya yang prinsipil. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di dunia ini selain dari siri. Menurut Abdullah (1985) bahwa keberadaan siri dalam kehidupan masyarakat Bugis dan Makasar dipandang sebagai jiwa, harga diri, dan martabat mereka. Oleh sebab itu, untuk menegakkan dan membela siri yang dianggap tercemar atau dicemarkan oleh orang lain, maka masyarakat Bugis dan Makasar akan bersedia mengorbankan apa saja yang dimiliki, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya siri dalam kehidupan mereka.

Sehubungan dengan itu Salam Basjah dan Sppena Mustaring (1966) telah memberikan pengertian siri yang sifatnya lebih konseptual, yaitu : (1) Siri itu sama artinya

dengan rasa malu, (2) Siri merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir, dan sebagainya. Hal ini merupakan kewajiban yang mempunyai sanksi adat, yakni hukuman menurut norma-norma adat, jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, (3) Siri itu sebagai daya pendorong yang bervariasi ke arah sumber pembangkitan tenaga untuk membanting tulang, bekerja mati-matian untuk suatu pekerjaan atau usaha.

Dari beberapa pandangan tentang siri tersebut di atas, maka pengertian siri sebenarnya mempunyai jangkauan yang meliputi semua aspek dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makasar. Namun apabila dilihat dari peranannya dalam kehidupan masyarakat pendukungnya pada hakekatnya siri mengandung dua unsur yang sifatnya cenderung kontraversial. Di satu pihak, siri merupakan manifestasi perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mengontrol tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Di lain pihak, siri merupakan manifestasi perbuatan untuk membela kehormatan demi tegaknya siri di masyarakat.

Sebagai manifestasi perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan mengontrol tingkah laku manusia siri dapat mendatangkan manfaat langsung bagi kehidupan manusia. Hal ini karena peranan siri dapat mendorong manusia untuk mencapai kejayaan dalam hidupnya. Manusia dirangsang oleh siri untuk bersikap tabah dalam perjuangan, ulet dan gigih dalam setiap usaha, jujur dalam kehidupan masyarakat, bersikap bijaksana sebagai pimpinan, bersikap adil terhadap setiap orang, pantang menyerah apabila menghadapi tantangan yang berat, dan sebagainya. Oleh karena dapat mendatangkan manfaat dalam kehidupan manusia, maka keberadaan siri dapat dinyatakan sebagai manifestasi perbuatan yang positif.

Sebaliknya, siri sebagai manifestasi perbuatan untuk membela kehormatan seringkali menimbulkan adanya korban jiwa dan harta benda dari kedua belah pihak yang terlibat peristiwa siri. Oleh sebab itu, peranan siri ini seringkali dikatakan sebagai manifestasi perbuatan yang negatif atau

distruktif. Hal ini karena adanya korban yang diakibatkan dalam konteks untuk membela kehormatan yang merasa harga dirinya tersinggung.

Dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makasar dikenal adanya istilah "na pakasirikka", yang artinya dia telah mempermalukan saya. Istilah ini biasa diucapkan apabila dalam pergaulan masyarakat ada seseorang yang secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Adapun perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain ini dapat berupa kata-kata kasar, tidak menghormati status orang lain, marah di depan umum, menggoda istri orang lain, dan sebagainya. Manusia yang merasa dirinya dipermalukan itu telah merasa harga dirinya tersinggung. Pada saat yang demikian ini mekanisme siri mulai bekerja secara otomatis dalam diri orang tersebut, dan kemudian berkembang untuk mencari jalan keluar dalam bentuk suatu manifestasi perbuatan (Abdullah, 1985).

Dengan demikian jelaslah bahwa penjelasan informan tersebut di atas pada dasarnya bersumber pada budaya siri yang merupakan manifestasi perbuatan untuk membela kehormatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan budaya siri sebagai manifestasi perbuatan untuk membela kehormatan ini dapat dipandang sebagai satu di antara beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya disintegrasi antara KKSS dengan masyarakat sekitar.

Masyarakat Kotamadya Pontianak yang terdiri dari berbagai golongan etnik telah memperlihatkan adanya pengelompokan-sosial, sebagaimana terlihat dari adanya paguyuban etnis atau kedaerahan. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh Anto Achdiyati (1989) mengenai hubungan antargolongan etnis di Kotamadya Pontianak, bahwa yang menjadi penyebab adanya pengelompokan-pengelompokan sosial tersebut satu di antaranya adalah tidak adanya kebudayaan etnis tertentu yang dominan, yang memiliki kekuatan untuk menjadi pedoman tingkahlaku dan menjadi

kerangka acuan dalam interaksi sosial bagi sekalian warga masyarakat dari berbagai golongan etnis yang ada.

Gejala tersebut di atas telah menyebabkan masing-masing golongan etnis di Kotamadya Pontianak menggunakan pedoman tingkahlaku dan kerangka acuan untuk berinteraksi atas dasar kebudayaannya masing-masing. Dengan demikian, interaksi antarwarga golongan etnis yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman, yang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya konflik antargolongan etnis.

Peristiwa kerusuhan antara sukubangsa Dayak dengan sukubangsa Madura di Kotamadya Pontianak yang terjadi pada awal tahun 1997 misalnya, menurut Tangdililing (dosen Fisipol Universitas Tanjungpura) bahwa kerusuhan tersebut juga disebabkan oleh adanya kesalahpahaman yang bersumber pada masalah kebudayaan di antara keduanya. Dalam tradisi Dayak ada falsafah yang berbunyi "Kalau ada seorang Dayak yang dilukai, maka semua orang Dayak ikut merasakan". Adat ini tampaknya tidak dipahami oleh masyarakat Madura. Sebaliknya, ada budaya masyarakat Madura yang tidak dipahami oleh masyarakat Dayak yakni adanya budaya carok. Andaikata ada salah seorang Madura disakiti, ia akan mempertahankan diri dengan apa yang ada pada dirinya saat itu (Ummat, 1997). Sehubungan dengan keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak, maka terjadinya kesalahpahaman dalam hubungan antargolongan etnik juga dapat dipandang sebagai satu di antara beberapa faktor yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan disintegrasi antara warga KKSS dengan masyarakat sekitar.

Akhirnya perlu disinggung pula adanya sikap sukuisme, yaitu suatu faham yang sempit tentang kesukuan dengan menilai sukunya secara berlebihan dan tidak obyektif serta rasional. Sikap ini pada dasarnya juga dapat dipandang sebagai satu di antara beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi antara warga KKSS dengan masyarakat sekitar.

BAB VI

KESIMPULAN

Kebiasaan merantau pada masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya sukubangsa Bugis dan Makasar sesungguhnya sudah berlangsung sejak lama. Mereka dikenal sebagai sukubangsa pelaut di Indonesia yang telah mengembangkan kebudayaan maritim sejak beberapa abad yang lalu. Bukti keperantauan atau mobilitasnya ini sekarang dapat dilihat dari adanya kerukunan-kerukunan mereka di berbagai daerah di Indonesia. Satu di antaranya adalah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kotamadya Pontianak.

Keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak pada dasarnya dapat dipandang sebagai sebuah paguyuban yang bersifat kedaerahan. Hal ini karena keanggotaan dari perkumpulan tersebut tidak hanya berasal dari sukubangsa Bugis dan Makasar saja, akan tetapi juga sukubangsa-sukubangsa lainnya yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan, seperti sukubangsa Toraja dan sukubangsa Mandar. Dengan kata lain bahwa para anggota perkumpulan ini berasal dari satu daerah asal.

Sehubungan dengan studi mengenai keberadaan paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan, maka keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak tersebut telah memperlihatkan bahwa kondisi daerah perkotaan yang multi etnis yang ditandai oleh adanya diferensiasi dan spesialisasi ternyata tidak selalu dapat melemahkan ikatan-ikatan

kekerabatan. Hal ini terlihat dengan adanya hubungan-hubungan yang terjadi antarsesama anggota KKSS yang didasarkan atas kepentingan bersama. Hubungan-hubungan ini telah membentuk jaringan-jaringan sosial berdasarkan atas daerah asal mereka.

Jaringan-jaringan ini dalam disiplin ilmu Antropologi disebut jaringan kekerabatan fiktif, yaitu suatu pengelompokan sejumlah orang yang dihubungkan satu dengan yang lainnya menurut suatu sistem kekerabatan yang mencakup identitas dan peranan yang digunakan oleh individu-individu dalam interaksi sosial mereka. Walaupun menurut kenyataan yang sebenarnya, mereka ini tidak dihubungkan satu sama lain menurut sistem kekerabatan, baik melalui hubungan keturunan maupun melalui hubungan perkawinan. Menurut Parsudi Suparlan (1988) bahwa jaringan kekerabatan fiktif seperti ini banyak atau umum terdapat di antara para perantau atau pendatang di daerah perantauan.

Dalam kaitannya dengan masalah persatuan dan kesatuan, keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak tersebut ternyata juga dapat menimbulkan suatu integrasi yang lebih luas cakupannya. Hal ini terlihat dari adanya keturunan para perantau dari Sulawesi Selatan yang lahir dan dibesarkandi Pontianak, yang juga menggabungkan diri menjadi anggota KKSS.

Sebagai sebuah paguyuban yang bersifat kedaerahan, keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak ternyata tidak hanya memeperlihatkan kepentingan "dirinya sendiri", tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti kegiatan operasi pasar berupa penjualan beras kepada warga masyarakat sekitar dengan harga murah (sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah), memberi bantuan pendidikan kepada anak-anak yang terancam putus sekolah, dan menjalin hubungan kemitraan dengan Pemerintah Daerah setempat. Berbagai kegiatan ini menunjukkan bahwa keberadaan KKSS di Kotamadya

Pontianak telah berhasil menjalin hubungan yang harmonis dengan warga masyarakat. Dengan kata lain bahwa keberadaan KKSS di Kotamadya Pontianak tidak hanya mengintegrasikan orang-orang Sulawesi Selatan yang ada di kotamadya tersebut, akan tetapi juga dengan masyarakat sekitar.

Adapun faktor-faktor yang cukup dominan sehingga KKSS dapat berintegrasi dengan masyarakat sekitar ini terlihat dari adanya semboyan “dimana bumi di pijak, di situ langit dijunjung”. Dengan adanya semboyan ini, maka warga KKSS di Kotamadya Pontianak tetap merasa berada di kampung halamannya sendiri. Perasaan ini pada akhirnya telah mendorong mereka untuk bersama-sama membangun daerah perantauan dengan masyarakat di sekitarnya.

Masyarakat Sulawesi Selatan yang merantau ke Kotamadya Pontianak ini pada dasarnya juga tidak putus hubungan dengan daerah asalnya. Hal ini di antaranya dapat dilihat dari adanya sumbangan-sumbangan pemikiran dari warga KKSS kepada Pemda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pembangunan daerah asalnya, hubungan silaturahmi yang mereka jalin apabila ada para pejabat atau tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang mengadakan kunjungan ke Kalimantan Barat, dan sebagainya.

Namun demikian, sejalan dengan terpeliharanya ikatan-ikatan kekerabatan melalui wadah paguyuban-paguyuban etnis atau kedaerahan di Kotamadya Pontianak, yang perlu diwaspadai bersama adalah terjadinya friksi yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi. Karena sebagaimana yang dilaporkan oleh Anto Achadiyat bahwa di Kotamadya Pontianak tidak ada kebudayaan golongan etnis tertentu yang dominan, yang memiliki kekuatan untuk menjadi pedoman tingkah laku dan menjadi acuan dalam interaksi sosial warga masyarakat kotamadya tersebut.

Sementara itu munculnya berbagai paguyuban etnis atau kedaerahan di Kotamadya Pontianak, pada dasarnya telah mendorong para anggotanya menggunakan pedoman tingkah

laku dan kerangka acuan untuk berinteraksi atas dasar kebudayaan etnis atau daerah asal mereka. Dalam interaksi antargolongan etnis yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan terjadinya friksi, sehingga dapat merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.

KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Hamid. 1985, **Manusia Bugis-Makasar**, Cet. I, Inti Idayu Press : Jakarta.
- Achadiyat, Anto. 1989, "Hubungan Antargolongan Etnik di Indonesia : Suatu Studi Kasus di Kalimantan Barat", dalam **Interaksi Antaretnik di Beberapa Propinsi di Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya : Jakarta.
- Ahimsa Putera, Shri Heddy. 1998, "Meneliti Paguyuban Kedaerahan dan Etnis di Indonesia, **Makalah**, disampaikan dalam Pembinaan Teknis Sosial Budaya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, di Ciawi-Bogor.
- Bruner, E. M. 1961 "Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatera", dalam **American Anthropologist**.
- Chen, Peter S. J. 1986. "Implikasi Sosio-Psikologis Atas Kepadatan Penduduk" (diterjemahkan oleh Hanna G. Wijaya, dkk.), dalam **Bulletin Antropologi**, Th II, Perpustakaan Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra-UGM : Yogyakarta.
- Hauser, Philip M. dan Gardner, Robert W. 1985, "Masa Depan Perkotaan : Perkembangan Sampai Saat Ini dan Arah Perkembangan di Masa Depan" (terjemahan oleh Masri Masir), dalam **Penduduk dan Masa Depan Perkotaan**, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Khairuddin, 1992, **Pembangunan Masyarakat**, Cet. I, Liberty : Yogyakarta.
- Koentjaraningrat (Editor), 1982. **Masalah-masalah Pembangunan : Bunga Rampai Antropologi Terapan**, LP3ES : Jakarta.

- Little, Kenneth, 1992, "Urbanisasi dan Asosiasi-Asosiasi Regional : Fungsinya yang Paradoks", dalam **Antropologi Perkotaan** (ed. S. Menno dan Mustamin Alwi), Cet. I, Rajawali : Jakarta.
- Matullada, 1990, "Kebudayaan Bugis-Makasar", dalam **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia**, Cet. XIII, Djambatan : Jakarta.
- Melalatoa, Junus M. 1995 **Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia**, Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Menno, S dan Alwi Mustamin, 1992, **Antropologi Perkotaan**, Cet. I, Rajawali : Jakarta.
- Rahim, A. Rahman, 1992, **Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis**, Cet. III, Hasanuddin University Press : Ujung Pandang.
- Shack, W. A. 1973, **Urban Anthropology**, oxford University Press : New York.
- Suparlan, Parsudi. 1988, "Jaringan Sosial", dalam **Bulletin Antropologi**, Perpustakaan Jurusan Antropologi, Fakultas sastra-UGM : Yogyakarta.

**ANGGARAN DASAR
KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN**

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang suku, budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam adalah suatu kekuatan potensi kebangsaan yang kaya akan nilai-nilai luhur, perlu dipelihara, dikembangkan dan diamankan sebagai salah satu sumber motivasi bagi kemajuan dan kejayaan bangsa.

Warisan nilai-nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan yang lahir di bumi Nusantara yang menjadi pedoman hidup masyarakat Sulawesi Selatan dan keturunannya adalah rangkaian nilai-nilai yang memperkaya Wawasan Kebangsaan/Wawasan Nusantara yang merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai luhur yang telah tersaji positif seyogianya terwujud dalam kepeloporan warga Sulawesi Selatan di dalam mengamalkannya secara konsisten, baik di dalam kehidupan pribadi, maupun di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dengan bertolak dari kesadaran bahwa masyarakat Sulawesi Selatan yang bermukim di luar Sulawesi Selatan dan tersebar di seluruh Nusantara dan bertanggung jawab membina, mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan, maka berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945, maka kami menghimpun diri dalam satu wadah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang disingkat KKSS, dengan Anggaran Dasar

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TEMPAT DIDIRIKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, disingkat KKSS.

Pasal 2

Waktu didirikan

KKSS didirikan di Jakarta, pada tanggal 12 Nopember 1976, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat kedudukan

KKSS Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

KKSS Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi.

KKSS Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kotamadya.

Perwakilan KKSS di Luar Negeri berkedudukan di kota-kota yang ada di Luar Negeri.

BAB II

AZAS, SIFAT, TUJUAN

Pasal 4

Azas

KKSS berazaskan Pancasila.

Pasal 5

Sifat

KKSS bersifat kekeluargaan.

Pasal 6

Tujuan

Organisasi ini bertujuan :

1. Untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggotanya.
2. Menciptakan hubungan kekeluargaan yang baik, saling kenal mengenal serta mempererat kerjasama antara anggota-anggotanya.
3. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari budaya Nasional.
4. Menanamkan motivasi akan makna keberadaan dan pengabdian warga Sulawesi Selatan di mana saja, di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai insan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota organisasi terdiri dari :

1. To Sulesana (warga kehormatan).
2. Anggota biasa.

BAB IV

SUSUNAN, KEKUASAAN DAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 8

Susunan organisasi

Susunan organisasi KKSS terdiri dari :

1. Badan Pengrus Pusat (BPP).
2. Badan Pengrus Wilayah (BPW).
3. Badan Pengrus Cabang (BPC).

Pasal 9

1. BPP KKSS menetapkan dan mengukuhkan To Sulesana (Warga Kehormatan).
2. BPW dan BPC dapat mengangkat Warga Kehormatan.
3. Warga Kehormatan yang telah diangkat oleh BPW, dikukuhkan oleh BPP, begitu pula BPC dikukuhkan oleh BPW.

Pasal 10

1. Badan Pengurus Pusat, Wilayah sampai tingkat Cabang dapat menetapkan, membentuk badan-badan otonom.
2. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS), Lembaga Kebudayaan Sulawesi Selatan (LKSS), Ikatan Keluarga Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sul-Sel), Kerukunan Keluarga Tingkat II Sulawesi Selatan, dan Perwakilan KKSS di luar negeri adalah organisasi otonom di lingkungan KKSS dan mendukung pelaksanaan program kerja KKSS.

Pasal 11

Kekuasaan

1. Musyawarah Besar/Musyawarah Luar Biasa adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Musyawarah Wilayah/Musyawarah Luar biasa Wilayah adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat wilayah.
3. Musyawarah Cabang /Musyawarah Luar Biasa Cabang adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tingkat cabang.

Pasal 12

Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan di semua tingkat merupakan Badan Pengurus KKSS di seluruh tingkat.
2. Dewan Pertimbangan di semua tingkat adalah mereka yang dianggap patut untuk diangkat menjadi Dewan Pertimbangan.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 13

Kuangan organisasi diperoleh dari :

1. Sumbangan yang bersifat sah dan halal.

2. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

BAB VI

PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan syah oleh musyawarah Besar atas persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari peserta Musyawarah Besar.

Pasal 15

Pembubaran organisasi hanya dapat dilaksanakan oleh Musyawarah Besar yang dilakukan khusus untuk itu.

BAB VII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Desember 1995

Pimpinan Sidang Mubes VI KKSS

Tertanda,

1. Dr. H. Anwar Hafid, MSc. (Ketua /Anggota)
2. H. Zainal Bintang (Wakil Ketua/Anggota)
3. Ir. H. Amir Abdullah (Sekertaris/Anggota)
4. Thamsul Makkawaru (Anggota)
5. Ishak Kabba (Anggota)

ANGGARAN RUMAH TANGGA KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. To Sulesana (Warga Kehormatan) adalah seseorang yang memiliki kearifan dan dipandang layak karena jasa dan pengabdianannya pada organisasi KKSS dan kemajuan pembangunan masyarakat Sulawesi Selatan.
2. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan atau pernah bermukim di Sulawesi Selatan atau setiap orang yang bersimpati dan yang di dalam kehidupannya telah menyerap serta menerima nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan sehingga nilai budaya Sulawesi Selatan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Sulawesi Selatan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap anggota biasa KKSS berhak :

1. Memperoleh perlakuan yang sama dalam organisasi.
2. Berbicara dan memberi suara dalam rapat-rapat/musyawarah KKSS serta mengemukakan usul-usul/saran-saran yang bersifat positif ke arah perbaikan organisasi.
3. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dalam Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang.
4. Memperoleh perlindungan, pembinaan dan bimbingan dalam organisasi di semua tingkat.

Pasal 3

Setiap anggota KKSS berkewajiban :

1. Tunduk dan taat kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan serta keputusan organisasi.

2. Memberi bantuan moril dan materil kepada organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan guna mensukseskan setiap usaha pelaksanaan maksud dan tujuan organisasi.
3. Senantiasa ikut serta menjaga nama baik organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

BAB III

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 4

Keanggotaan berakhir apabila :

1. Berhenti atas permintaan sendiri.
2. Meninggal dunia.
3. Karena kembali bermukim di Sulawesi Selatan.

BAB IV

SANKSI ORGANISASI

Pasal 5

1. Badan Pengurus KKSS di semua tingkat dapat memberi sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi terhadap anggota yang ternyata melanggar aturan organisasi atau apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan dan merusak nama baik organisasi.
2. Setiap anggota KKSS yang dapat sanksi berhak mengajukan pembelaan diri pada rapat yang dilaksanakan khusus untuk itu.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS ORGANISASI KERUKUNAN KELUARGA SULAWESI SELATAN

Pasal 6

Pengurus organisasi KKSS diatur sebagai berikut :

1. Badan Pengurus Pusat disingkat BPP.

2. Badan Pengurus wilayah disingkat BPW.
3. Badan Pengurus Cabang disingkat BPC.

Pasal 7

Komposisi kepengurusan diautr sebagai berikut :

1. Badan Ekstra Struktural
 - 1.1 To Sulesana (Warga Kehormatan) terdapat di seluruh tingkat.
 - 1.2 Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 - Ketua.
 - Wakil Ketua.
 - Anggota di seluruh tingkatan.
2. Badan Pengurus Pusat terdiri dari :
 1. Ketua Umum.
 2. Wakil Ketua Umum.
 3. Ketua-ketua.
 4. Sekertaris Jendral.
 5. Wakil-wakil Sekertaris Jendral.
 6. Bendahara Umum.
 7. Wakil-wakil Bendahara Umum.
 8. Ketua-ketua dan Wakil-wakil Ketua Departemen.
3. Badan Pengurus Wilayah (BPW) terdiri dari :
 1. Ketua.
 2. Wakil Ketua.
 3. Sekertaris.
 4. Wakil-wakil Sekertaris.
 5. Bendahara.
 6. Wakil-wakil Bendahara.
 7. Ketua-ketua Biro dan Wakil-wakil Biro.
4. Badan Pengurus Cabang (BPC) terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua.
 3. Sekertaris.
 4. Wakil-wakil Sekertaris.
 5. Bendahara.
 6. Wakil-wakil Bendahara.
 7. Ketua-ketua Bagian dan Wakil Ketua Bagian.

BAB VI

MASA BHAKTI

Pasal 8

Masa bhakti kepengurusan KKSS di semua tingkat adalah 4 (empat) tahun.

BAB VII

PENGGANTIAN PENGURUS ANTARA WAKTU

Pasal 9

Penggantian pengurus antara waktu diatur secara tersendiri dalam peraturan organisasi.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 10

Kewajiban pengurus diautr sebagai berikut :

1. Badan Pengurus Pusat bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan organisasi dan mewakili organisasi luar.
2. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-ketua di semua tingkat memimpin sehari-hari jalannya organisasi.
3. Ketua Departemen, Ketua biro dan Ketua Bagian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidang masing-masing.
4. Sekertariat Jendral dibantu oleh Wakil-wakil Sekertariat Jendral (di tingkat pusat), Sekertariat dan Wakil-wakil Sekertariat (di tingkat wilayah dan cabang) melakukan pekerjaan sekertariat, menyusun laporan-laporan dan dokumen untuk kepentingan kelancaran organisasi.

BAB IX

PEMBAGIAN/SUSUNAN WILAYAH

Pasal 11

Untuk kepentingan kelancaran komunikasi dan pembagian/susunan wilayah organisasi KKSS di atur sebagai berikut :

1. Pada Daerah Tingkat I Propinsi di luar Sulawesi Selatan dapat dibentuk Pengurus Wilayah, jika terdapat sekurang-kurangnya tiga cabang.
2. Pada Daerah Tingkat II (setingkat kotamadya, kabupaten dan kota administratif) di luar Sulawesi Selatan dapat dibentuk pengurus cabang.
3. Apabila dianggap perlu BPW-BPW dapat membentuk BPC-BPC di tingkat kecamatan, kelurahan/desa serta membentuk perwakilan KKSS di luar negeri.

BAB X

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

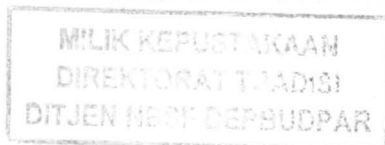
Pasal 12

1. Musyawarah Besar diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Musyawarah Wilayah, Cabang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
3. Musyawarah Luar biasa dapat diadakan apabila dianggap perlu.

Pasal 13

Peserta diatur sebagai berikut :

1. Musyawarah Besar/Musyawarah Luar Biasa dihadiri peserta dan peninjau sebagai berikut:
 - To Sulesana (Warga Kehormatan).
 - Dewan Pertimbangan.
 - BPP.
 - BPW.
 - BPC.
 - Organisasi otonom yang ada di lingkungan KKSS.
2. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - To Sulesana (Warga Kehormatan).
 - Dewan Pertimbangan.
 - BPP.
 - BPW.
 - BPC.
 - Organisasi otonom di lingkungan KKSS.



3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - To Sulesana (Warga Kehormatan).
 - Dewan Pertimbangan.
 - BPP.
 - BPW.
 - BPC.
 - Organisasi otonom yang ada di lingkungan KKSS.

Pasal 14

1. Musyawarah Besar/ Musyawarah Luar Biasa sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Wilayah, Cabang serta organisasi-organisasi di lingkungan KKSS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 Anggaran Dasar.
2. Musyawarah Wilayah/Musyawarah Luar Biasa sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Cabang serta organisasi otonom dalam wilayah lingkungan KKSS.
3. Jumlah peserta musyawarah ditingkatkan diatur secara tersendiri dalam peraturan organisasi.
4. Yang dimaksud dengan peninjauan adalah mereka yang diundang secara perorangan oleh KKSS.

Pasal 15

Rapat Kerja Nasional di tingkat Pusat, Rapat kerja di tingkat Wilayah dan Rapat kerja di tingkat Cabang diadakan 1 (satu) kali antara 2 (dua) Musyawarah.

Pasal 16

Tugas Musyawarah Besar

1. Mengevaluasi dan menerima pertanggungjawaban Badan Pengurus Pusat.
2. Menetapkan Program Kerja.
3. Menyempurnakan AD/ART.
4. Memilih/menetapkan BPP KKSS.

BAB XI
RAPAT – RAPAT

Pasal 17

1. Rapat Badan Pengurus Pusat terdiri dari :
 - Rapat Pengurus Harian.
 - Rapat Pleno Pusat.
2. Rapat Badan Pengurus Wilayah terdiri dari :
 - Rapat Pengurus Harian Wilayah.
 - Rapat Pleno Wilayah.
3. Rapat Badan Pengurus Cabang terdiri dari :
 - Rapat Pengurus Harian Cabang.
 - Rapat Pleno Cabang.

BAB XII
SUMBER KEUANGAN

Pasal 18

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari :

1. Iuran anggota.
2. Usaha yang sah dan halal sesuai dengan ketentuan organisasi.
3. Donatur yang tidak mengikat dari anggota maupun simpatisan.
4. Hibah/wakaf.

BAB XIII
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 19

Bilamana organisasi KKSS dibubarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Anggaran Dasar, maka segala kekayaan yang dimiliki diserahkan kepada Badan-Badan Sosial yang penetapan dan pembagiannya diatur oleh badan-badan yang dibentuk khusus untuk itu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Desember 1995

Pimpinan Sidang Mubes VI KKSS

Tertanda,

1. Dr. H. Anwar Hafid, MSc. (Ketua /Anggota)
2. H. Zainal Bintang (Wakil Ketua/Anggota)
3. Ir. H. Amir Abdullah (Sekertaris/Anggota)
4. Thamsul Makkawaru (Anggota)
5. Ishak Kabba (Anggota)

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Umur (Th)	Sukubangsa	Pekerjaan
1.	H. A. Kadir Ubbe SH.	46	Bugis	PNS
2.	Ir. Anugerah A. Anwar	38	Makasar	PNS
3.	Makmur	50	Sunda	PNS
4.	Uslan	27	Bugis (ketu- runan)	PNS
5.	Harry Setiawan	40	Bugis (ketu- runan)	PNS
6.	Daud Adi	47	Toraja	PNS
7.	Drs. M. Lutfi MS.	38	Bugis	PNS
8.	Pujianto	40	Jawa	PNS
9.	DR. Tangdililing	50	Toraja	Dosen
10.	Andi Rajali	37	Bugis (ketu- runan)	Swasta
11.	Andi Djainuddin Tiro	50	Bugis	Swasta
12.	H. Andi Bahrn	40	Bugis	Swasta

Perpust
Jender

30